



# PROFIL BPK

## PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2022



[sumbar.bpk.go.id](http://sumbar.bpk.go.id)

# Sekapur Sirih

---

*“Harapan kami dengan kehadiran buku profil perwakilan ini dapat menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan juga dapat mengenal lebih dekat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”*

---



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam Sejahtera bagi kita semua

Songket silungkang yang mendunia  
Dipamerkan pengrajin dalam acara bazar  
Assalamualaikum Bapak Ibu semua  
Kami sajikan profil BPK Sumbar

Buku profil ini menyajikan secara khusus mengenai data dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kegiatan yang dilaksanakan, kinerja Sub Auditorat dan Sekretariat Perwakilan, serta entitas pemeriksaan di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Melalui buku ini pula kami menggambarkan sejarah dan perkembangan administratif entitas di Sumatera Barat.

Harapan kami dengan kehadiran buku profil perwakilan ini dapat menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan juga dapat mengenal lebih dekat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam memberikan data dan informasi dalam mewujudkan penyusunan buku Profil ini.

Harum baunya buah kuini  
Dibawa dari lubuk selasih  
Demikianlah sekapur sirih ini  
Mohon maaf dan terimakasih

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, Agustus 2023  
Kepala Perwakilan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arif Agus'.

Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA

# Daftar Isi

Sekapur Sirih	Informasi Pemeriksaan
Daftar Isi	Entitas Pemeriksaan
Sejarah dan Profil BPK	Provinsi Sumatera Barat
Arti dan Makna Lambang BPK RI	Kabupaten Dharmasraya
Hymne dan Mars BPK RI	Kabupaten Pesisir Selatan
Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Strategis BPK RI	Kabupaten Sijunjung
Profil Pimpinan BPK RI	Kabupaten Solok
Selayang Pandang BPK Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan
Kepala Perwakilan dari Masa ke Masa	Kota Pariaman
Pejabat Struktural BPK Sumatera Barat	Kota Sawahlunto
Struktur Organisasi	Kota Solok
Peta Strategi	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sasaran Strategis dan IKU BPK Sumatera Barat	Kota Padang
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kabupaten Lima Puluh Kota
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Padang Pariaman
Sekretariat Perwakilan	Kabupaten Pasaman
Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan	Kabupaten Pasaman Barat
Subbagian Sumber Daya Manusia	Kabupaten Tanah Datar
Subbagian Keuangan	Kota Bukittinggi
Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	Kota Payakumbuh
Subbagian Hukum	Kota Padang Panjang
Subauditorat Sumbar I	Kabupaten Agam
Subauditorat Sumbar II	Galeri Foto

## Redaksi

Pengarah : Arif Agus

Penanggungjawab : Walujo

Redaktur : Rita Rianti

Tim Redaksi : Meri Oktorita, Della Nurul Amalia, Lidya Fransiska, Siti Aisyah, Mimi Khairani



**Silek Minang**



**Dragon Boat**



**Tour de Singkarak**

# **Sejarah**

# **dan**

# **Profil BPK**

# Sejarah BPK

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## === 1 Januari 1947 - Awal Pembentukan ===



Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947

No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

## === 6 Nopember 1948 - Kedudukan di Yogyakarta ===

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

## === 14 Desember 1949 - Dewan Pengawas Keuangan ===

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

## **= 1 Oktober 1950 - Badan Pemeriksa Keuangan (UUDS 1950) =**

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.



## **=== 5 Juli 1959 - Badan Pemeriksa Keuangan (UUD 1945) ===**

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

## **=== 12 Oktober 1963 - PERPU No. 6 Tahun 1964 ===**

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

## **=== UU No. 5 Tahun 1973 - Badan Pemeriksa Keuangan ===**

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

## **== TAP MPR No.VI/MPR/2002 - Independen dan Profesional ==**

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

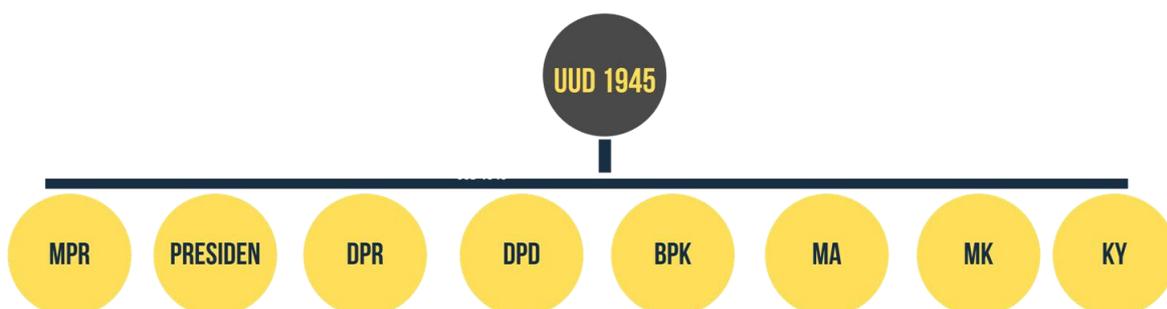
## **== Undang-Undang di bidang Keuangan Negara ==**

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang dibidang Keuangan Negara, yaitu;

- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

## **== Kedudukan BPK RI ==**

Kedudukan BPK RI dalam Organisasi Ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut



# Lambang BPK



**Garuda Pancasila** melambangkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya azas Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkewajiban melestarikan Pancasila dan UUD 1945.

**Motif Cakra** melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketentraman dunia dari angkara murka. Cakra merupakan bentuk utama Lambang Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai alat Bangsa Indonesia untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

**Tiga buah mata tombak** melambangkan bahwa ruang lingkup Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

- ❖ Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan dan perundangan
- ❖ Pemeriksaan atas daya guna (efisiensi dan kehematan) ekonomi
- ❖ Pemeriksaan atas hasil program (efektifitas)

**Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung kecil** pada sisi bagian luar Cakra melambangkan tahun kelahiran Badan Pemeriksa Keuangan yaitu tahun 1947.

Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menopang Cakra merupakan "Padmasana" yang berarti tahta bunga teratai melambangkan kesuburan lahir dan batin.

Makna Cakra ditopang oleh bunga teratai tersebut ialah Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara melaksanakan tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan Lembaga-lembaga Tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan terhadap independensi dalam setiap kegiatan.

Tujuh lembar kelopak bunga teratai juga melambangkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senantiasa berlandaskan pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir.

Warna Lambang Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning emas, mempunyai makna keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara, sedangkan warna putih pada kelopak bunga teratai mempunyai makna kesucian, kebersihan, dan kejujuran.

# Hymne BPK

**#Kami Sang Abdi Negara  
Mengemban Tugas Mulia  
Untuk Tanah Air Tercinta  
Demi Bangsaku Indonesia**

**# Kami Siap Jiwa dan Raga  
Mengabdikan Untukmu Negara  
Tegar Takkan Pernah Gentar  
Menjaga Harta Negara  
Dengan Semangat Pancasila**

**Kami Sang Abdi Negara  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Bersumpah dengan Hati yang  
Kuat  
Slalu Ada Untukmu Indonesia**

**Back to #**

# Mars BPK

**#Wahai Sang Abdi Negara  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Hayatilah dan Amalkan  
Pengabdianmu**

**Dengan Menjunjung Tinggi  
Independensi  
Integritas dan Profesionalisme  
Memeriksa Pengelolaan dan  
Tanggung Jawab Keuangan  
Negara**

**Demi Bangsaku Indonesia  
Tanah Air Tercinta  
Kami Siap Jiwa dan Raga  
Mengabdikan untuk Negara**

**Tegar Takkan Gentar  
Menjaga Mengayomi Harta  
Negara  
Dengan Semangat Pancasila**

**Back to #**

# Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

# Misi

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian Negara.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

# Tujuan

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

# Sasaran Strategis

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

# Nilai Dasar

BPK RI dalam melaksanakan visi misinya dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

## Integritas

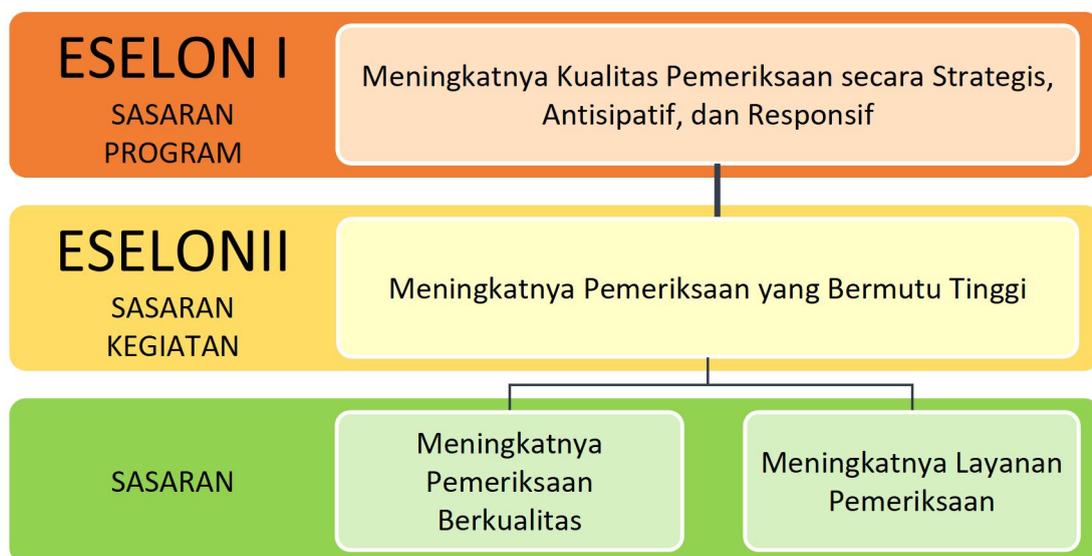
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

## Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

## Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.



# PROFIL PIMPINAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



# Ketua dan Wakil Ketua BPK RI



Dr. Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA., CFrA

Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 12 Oktober 1965

Menyelesaikan pendidikan doktor Bidang Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran di Tahun 2020 dan meraih gelar profesi *Certified State Finance Auditor* (CSFA) yang merupakan sertifikasi untuk pemeriksa keuangan negara serta *Certified Forensic Auditor* (CFrA).

Beliau mulai berkarier di bidang pemerintahan saat menjadi Anggota DPR RI Tahun 2006 s.d 2017. Lalu menjadi Anggota V BPK RI pada April 2017 s.d Oktober 2019, Anggota IV BPK RI pada Oktober 2019 s.d April 2022. Hingga menjadi Ketua BPK RI pada April 2022 s.d sekarang.

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA,  
CSFA

Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 1 Agustus 1972

Menyelesaikan pendidikan doktor Bidang Ilmu Doktoral Ilmu Pemerintahan di FISIP Universitas Padjajaran dan meraih gelar profesi *Certified State Finance Auditor* (CSFA) yang merupakan sertifikasi untuk pemeriksa keuangan negara.

Karier beliau dimulai dari Supervisor KAP tahun 1998 s.d. 1999

Internal Advisor PT. Banten Java Persada (Bukaka Group) tahun 2000 s.d. 2001, Manager Pusat Pengembangan Akuntansi STAN tahun 2001

s.d. 2005, Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia III tahun 2005 s.d. 2012, Tenaga Ahli Bidang BUMN/BUMD dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan tahun 2012 s.d. 2013, Anggota II BPK RI, Oktober 2014 s.d. Oktober 2019., hingga menjadi Wakil Ketua BPK sejak Oktober 2019 s.d. sekarang.



# Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI



Anggota I BPK /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I

**Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE**

Beliau resmi dilantik menjadi Anggota VI BPK pada November 2021 s.d April 2022 kemudian menjadi Anggota I BPK pada April 2022 s.d sekarang. Sebelum menjadi Anggota BPK beliau merupakan pejabat karier pada Kementerian Keuangan pada Kanwil DJBC Sulbagsel

Anggota II BPK / Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II  
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA

Beliau memulai karier politiknya dengan menjadi Anggota DPR RI pada tahun 2009 – 2014 dan berlanjut pada periode 2014-2019 sebelum kemudian terpilih menjadi Anggota VII BPK RI pada 2019 s.d 2022 dan Anggota II BPK RI pada 2022 s.d saat ini.



Anggota III BPK /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III  
**Dr. Achsanul Qosasi, CSFA**

Lahir di Sumenep tanggal 10 Januari 1966, Anggota III BPK ini meraih Gelar Guru Besar Kehormatan oleh Universitas Airlangga dalam bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair.

Beliau merupakan Anggota DPR RI sebelum menjabat menjadi Anggota VII BPK pada Oktober 2014 s.d April 2017, Anggota III BPK mulai April 2017 s.d sekarang. Ditengah perjalanan karirnya beliau juga mendapatkan penghargaan “Bintang Jasa Utama” pada Tahun 2019.

**Anggota IV BPK /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV  
Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV**

Beliau merupakan tokoh muda pengusaha sekaligus politisi yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Beliau menjadi Anggota DPR mulai Tahun 2014 sebelum kemudian menjadi Anggota IV BPK pada April 2022.



**Anggota V BPK /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V  
Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M**

Lahir di Purwakarta pada 1 September 1957, Beliau merupakan politisi senior dengan karier yang cukup panjang dan cemerlang. Mengawali menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 1992 hingga 2019 sebelum akhirnya dilantik menjadi Anggota V BPK RI pada Tahun 2022.

**Anggota VI BPK / Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI  
Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA**

Lahir di Palembang, 10 Oktober 1968 Beliau meraih gelar Doktor dari Universitas Brawijaya. Beliau merupakan aktivis sekaligus politikus yang menjadi Anggota DPR RI pada Tahun 2009 s.d 2019 sebelum akhirnya dilantik menjadi Anggota BPK pada Oktober 2019.



**Anggota VII BPK /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII  
Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA, CFrA**

Beliau merupakan satu-satunya Anggota BPK yang bukan berlatar belakang politisi. Sebelum menjadi Anggota BPK, beliau merupakan pejabat karier di BPK pada Auditorat Keuangan Negara I.

Beliau meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran. Beliau juga mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Pratama dari TNI AD pada Maret 2022 dan Bintang Jalasena Pratama dari TNI AL pada Maret 2022.

# Tari Piring



# Tari Payung

# Tari Indang



# Tari Lilin

# Tari Pasambahan





## Selayang Pandang BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Memenuhi amanat UUD 1945 serta UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK melakukan pembukaan Kantor Perwakilan di Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan perluasan lingkup dari salah satu Sub Auditorat yang semula berada pada lingkup wilayah kerja BPK Perwakilan Sumatera Utara, sesuai dengan Keputusan BPK No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mulai beroperasi di Jalan Kuini No. 79 Padang pada tanggal 10 Oktober 2007 dan diresmikan pada tanggal 26 Oktober 2007 oleh Ketua BPK, Prof. Dr. Anwar Nasution. Pada bulan September 2009 terjadi gempa bumi, sehingga kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pindah ke Jalan Kali Serayu No. 11 Padang. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (hingga sekarang) menempati gedung baru di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang, yang diresmikan secara langsung oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo.

# Prestasi yang Dicapai

(dalam 5 tahun terakhir)

## 2022

- Peringkat I Satker dengan Nilai transaksi kartu kredit pemerintah terbanyak dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang Tahun 2021

## 2021

- Peringkat 3 Satker Terbaik dalam Pengelolaan Kinerja Tahun 2020 Kategori Satker Perwakilan
- Peringkat 2 Satker Terbaik dalam Pengelolaan Risiko Tahun 2020 kategori Satker BPK Perwakilan
- Peringkat I Satker dengan Nilai transaksi kartu kredit pemerintah terbanyak dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang Tahun 2020
- Juara III Lomba video merangkai bunga dalam rangka HUT BPK ke-74
- Juara 3 Lomba Video Sejarah BPK dalam rangka HUT RI ke 76 - Juara 3 e-Sports Tournament BPK dalam rangka HUT RI ke 76
- Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal di Sumbar dan Predikat Informatif untuk kategori Instansi Vertikal pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat Tahun 2021 di Bukittinggi tanggal 6 Desember 2021

## 2020

- Tim Terbaik Pertama Penilaian Kualitas LHP LK Tahun 2019 kepada Tim
- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2017 di Jakarta tanggal 20 Januari 2020.
- Penghargaan atas Keterbukaan Informasi Publik oleh Media Delik News tanggal 31 Agustus 2020.
- Penghargaan atas Keterbukaan Informasi Publik oleh Media Minang News
- Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik dan Predikat Informatif untuk kategori Instansi Vertikal pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat Tahun 2020 di Padang tanggal 25 November 2020

## 2019

- Juara Pertama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Terbaik di BPK yang disampaikan oleh Anggota V BPK RI pada Rapat Koordinasi Kehumasan di Bali tanggal 22 Maret 2019, PIK BPK Perwakilan Sumatera Barat dapat dijadikan contoh bagi perwakilan lain

untuk membuat publik area, dimana PIK disatukan dengan perpustakaan sehingga area tersebut memang optimal untuk pelayanan publik

- Peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Instansi Vertikal pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat Tahun 2019 di Padang tanggal 6 Desember 2019
- Anugerah Achievement Motivation Person tahun 2019 kepada Ibu Yusnadewi di Padang tanggal 6 Desember 2019
- Penghargaan Satker pengelola aset terbaik keempat di wilayah kerja KPKNL Padang dari Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau pada tanggal 17 Oktober 2019.

## **2018**

- Predikat WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) di Jakarta tanggal 10 Desember 2018, Hasil Reviu dan Penilaian atas Implementasi Pembangunan Zona Integritas oleh KEMENPAN dan RB
- Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal Se- Sumatera Barat Tahun 2018 di Padang tanggal 11 Desember 2018, Hasil Reviu dan Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

# Inovasi yang Dilakukan

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
1	Balai Basuo: Wajah Baru PIK BPK Sumbar	<p>Peresmian Balai Basuo tanggal 11 Oktober 2018 menandai dimulainya langkah terobosan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan sarana PIK yang ada menjadi tempat untuk melakukan transfer knowledge antara BPK dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>Di Balai Basuo terdapat ruang PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) sebagai bentuk pelayanan BPK kepada masyarakat dan juga terdapat perpustakaan dengan penampilan baru.</p> <p>Balai Basuo juga menjadi tempat berkumpul dan bertemu para pegawai untuk berbagi seperti kegiatan KTF (Knowledge Transfer Forum), diskusi dan kegiatan sharing lainnya.</p>	Dengan membangun komunikasi yang lebih dekat, terbuka, dalam suasana pembelajaran, diharapkan akan mampu mendorong pemenuhan harapan para pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong pencapaian salah satu sasaran strategis BPK untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan.	Subbag Humas dan TU Kalan
2	BPK Mendengar	<p>Salah satu peran BPK adalah mengelola efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan kemampuan BPK.</p> <p>Untuk menjembatani para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, saran, tanggapan, dan kritikan terhadap BPK, dilaksanakan kegiatan "Forum BPK Mendengar, yang dilaksanakan dengan berkunjung kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah beserta jajarannya bebas memberi masukan terkait pemeriksaan dan LHP BPK.</p>	Kegiatan "Forum BPK Mendengar" ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK ke depan. BPK berusaha terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga manfaat pemeriksaan BPK bagi masyarakat terus meningkat.	Subbag Humas dan TU Kalan
3	Sahabat BPK	Forum ini merupakan wujud nyata BPK Provinsi Perwakilan Sumatera Barat yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa sebagai salah satu pemangku kepentingan yang dinilai memiliki keterikatan dan	Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat BPK, menebarkan manfaat, pengetahuan yang diperoleh untuk pemahaman yang lebih	Subbag Humas dan TU Kalan

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
		ketertarikan serta mampu berperan sebagai public relation BPK. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Forum Sahabat BPK berupa Forum Knowledge Sharing, yaitu pengenalan BPK kepada masyarakat khususnya mahasiswa melalui berbagai kegiatan dan publikasi BPK di media.	baik terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah dari perspektif peran, tugas dan tanggung jawab BPK.	
4	<i>Sharing Session</i>	<p>Karena menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik, BPK Perwakilan Sumatera Barat berinovasi dengan menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, informatif dan terbuka. PIK tidak lagi hanya untuk melayani permintaan data dan pengaduan masyarakat namun juga merupakan tempat untuk mengadakan berbagai kegiatan, misalnya Sharing session yang merupakan salah satu bentuk tanggungjawab BPK dalam memperkuat peranan pengawasan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah.</p> <p>BPK memfokuskan kegiatan sharing session dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) khususnya dengan materi-materi pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh BPK.</p>	Kegiatan "Sharing Session" ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sehingga tercapai salah satu sasaran strategis BPK.	Subbag Humas dan TU Kalan,  Subauditorat
5	Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara	<p>Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah hasil konversi Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menjadi perpustakaan riset.</p> <p>Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terintegrasi dengan PIK sehingga disebut Balai Basuo. Perpustakaan BPK juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk membuka akses publik terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan riset.</p>	Tujuan dari Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kunjungan dari peneliti mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan jumlah penelitian yang berkaitan dengan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, meningkatkan mutu penelitian tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.	Subbag Humas dan TU Kalan

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
6	Rangkiang Data	<p>BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membuat suatu database informasi yang berisi mengenai informasi keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu terinspirasi dari Rangkiang, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membuat suatu wadah yang disebut "Rangkiang Data" dimana didalamnya terdapat berbagai data mengenai keuangan daerah pada 20 entitas di Sumatera Barat.</p> <p>Rangkiang Data merupakan bentuk komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan memaksimalkan pelayanan kepada publik.</p>	Dengan adanya Rangkiang Data ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh data keuangan dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna layanan informasi publik yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.	Subbag Humas dan TU Kalan
7	Buku Tamu Digital	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah membuat program pengadministrasian tamu berbasis database menggunakan Microsoft Access yang membantu Resepsionis mengadministrasikan tamu, mempermudah pencarian database nama tamu apabila diperlukan dan melaporkan pada Subbagian terkait serta membuat program pengadministrasian tidak membutuhkan kertas.	Dengan telah dibuatnya Buku Tamu Digital, dapat memudahkan Resepsionis dalam mengadministrasikan tamu, mempermudah pencarian database dan melaporkan pada Subbagian terkait. Dari Buku Tamu Digital sudah dapat diketahui jumlah tamu yang berkunjung selama tahun 2019, dan memudahkan mencari nama tamu jika dibutuhkan.	Subbag Humas dan TU Kalan
8	Informasi Digital BPK dari Masa Ke Masa	Salah satu informasi publik yang dapat dilihat di ruang PIK adalah informasi mengenai BPK Sumbar dari masa ke masa. Mengikuti perkembangan teknologi, informasi ini dikemas dalam bentuk informasi digital yang tertuang dalam sebuah media interaktif berupa layar sentuh.	BPK dari masa ke masa memberikan informasi kepada siapa saja yang berkunjung ke Balai Basuo didukung dengan foto-foto yang membantu menceritakan detail kejadian-kejadian selama BPK Sumbar berdiri.	Subbag Humas dan TU Kalan
9	Program Pusako - Pelatihan Untuk Siap Bakarajo	Program "Pusako" atau Pelatihan Untuk Siap Bakarajo adalah program magang yang dibuka oleh BPK Perwakilan Sumbar untuk CPNS atau pelajar SMA/ sederajat,	Tujuan Program Pusako adalah untuk mengenalkan peserta tentang tuntutan lingkungan kerja, misal aktivitas rutin dalam	Subbag SDM dan Subbag Humas dan TU Kalan

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
		<p>dan Mahasiswa yang diluncurkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, skill dan pengenalan lingkungan kerja ke peserta magang dengan bimbingan mentor terbaik di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Program Pusako adalah wujud kepedulian BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk membantu menyiapkan talenta yang memiliki nilai lebih dengan memberikan keterampilan peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja dan memberikan kontribusi positif saat bekerja dimanapun.</p>	<p>menyelesaikan pekerjaan, kualitas kerja, jam kerja, kedisiplinan, cara dan etika memberikan layanan kepada konsumen/tamu/stakeholders, komunikasi dengan sesama pegawai dan dengan pimpinan.</p>	
10	Pagi Menyapa	<p>Salah satu cara BPK Sumbar mengkomunikasikan visi, misi, kode etik, maupun update tentang layanan yang ada pada perwakilan. Bentuk komunikasi dari Pagi Menyapa yaitu melalui pengeras audio yang dapat didengar di seluruh ruangan, dan membuat suatu tampilan digital yang disebar melalui whatsapp group perwakilan.</p> <p>Pagi Menyapa dilakukan setiap hari kerja. Untuk menarik engagement dengan pegawai, setiap minggunya juga diadakan quiz berhadiah dengan pertanyaan seputar kode etik ataupun terkait isi konten pada Pagi Menyapa.</p>	<p>Diharapkan dengan cara ini, nilai-nilai yang terdapat pada visi misi serta kode etik BPK dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh pegawai BPK Sumbar.</p>	Subbag Humas dan TU Kalan, seluruh unit kerja Perwakilan
11	SiPinset (Sistem Peminjaman Aset)	<p>SiPinset adalah sistem yang dibuat khusus untuk melakukan proses peminjaman BMN di lingkungan BPK Sumbar. Para pegawai cukup mengakses aplikasi Spinset pada laptop/komputer dengan menggunakan NIP masing-masing sebagai User id, setelah masuk ke dalam aplikasi tersebut para pegawai dapat mengetahui ketersediaan BMN yang akan dipinjam secara real time. selanjutnya pegawai bisa melakukan pengajuan pinjaman dengan melampirkan surat tugas atau nota dinas dari atasan langsung.</p>	<p>Peminjaman aset di lingkungan BPK sudah dapat dilaksanakan secara online dengan informasi yang lengkap. Aplikasi ini mempermudah pengguna untuk mengajukan peminjaman aset.</p>	Subag Umum dan TI

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
12	Siemas (Sistem Informasi Kehumasan)	Siemas (Sistem Informasi Kehumasan) merupakan media komunikasi Sub Bagian Humas TU kepada pihak internal, media dokumentasi kegiatan maupun persuratan yang disusun dan diorganisir, serta sebagai pusat database persuratan dan dokumentasi kegiatan yang dikelola oleh Sub Bagian Humas TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Memper memudahkan pengguna untuk mendapatkan dokumentasi persuratan dan kegiatan yang ada di BPK Perwakilan Sumbar	Sub Bagian Humas TU
13	Si Komen (Sistem Manajemen Pengetahuan)	<p>Sistem Manajemen Pengetahuan atau Knowledge Management System adalah sistem (umumnya berbasis teknologi informasi) yang digunakan untuk melakukan pengelolaan atas pengetahuan pada tiap tahapan, baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, penggunaan maupun penyempurnaannya.</p> <p>Manajemen Pengetahuan atau Knowledge Management didefinisikan sebagai upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi, untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.</p>		Subbagian SDM
14	Palanta (Pemantauan TLHP Sepanjang Tahun)	<p>BPK Perwakilan Sumatera Barat telah memiliki dua kebijakan dalam pelaksanaan pemantauan dalam pelaksanaan pemantauan TLRHP yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Sepanjang Tahun dan Penyusunan Panduan Pengisian SiPTL.</p> <p>Tujuan Pemantauan Tindak Lanjut Sepanjang Tahun untuk menghindari menumpuknya</p>	Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi tindak lanjut. Panduan ini sangat membantu pejabat/pimpinan BPK dan pejabat entitas dalam memahami tindak lanjut dan hasil tindak lanjut	Sub Auditorat

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
		<p>bahan tindak lanjut yang akan ditelaah dan divalidasi, mendorong entitas aktif melakukan input bahan tindak lanjut dalam SiPTL, serta dapat memberikan penilaian yang lebih riil atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemeriksa. Penyusunan panduan pengisian SiPTL digunakan sebagai pedoman bagi pemeriksa dalam melakukan penelaahan atas bahan tindak lanjut serta memudahkan pelaksanaan kegiatan sehingga terwujudnya keseragaman perlakuan antar pembahas. Melalui kebijakan Pemantauan Tindak Lanjut Sepanjang Tahun, Pemda melakukan input dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi SiPTL mulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang dosir menelaah dokumen tindak lanjut tersebut setelah dokumen tindak lanjut diverifikasi dan ditugaskan oleh Kepala Subauditorat. Dengan penerapan panduan pengisian SiPTL telah memberikan perubahan dalam proses penelaahan oleh tim pemantauan, verifikasi dan validasi pejabat secara berjenjang, serta kemudahan entitas dalam menerima informasi untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam SiPTL</p>	<p>dari rekomendasi BPK. Selain itu, penugasan selama setahun dapat mempercepat progress entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut dapat dirasakan manfaatnya oleh entitas. Selain itu, hal tersebut juga memberikan manfaat bagi pemeriksa/pembahas terkait dengan fairness dalam pemberian angka kredit.</p>	
15	Sekretariat Kerugian Daerah	<p>Dalam rangka mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan terpadu kepada</p>	<p>Mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan memberikan informasi yang akurat, transparan,</p>	<p>Sub Bagian Hukum Sub Auditorat</p>

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
		<p>pemangku kepentingan tentang kerugian Negara/daerah, dipandang perlu membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.</p> <p>Tugasnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendata seluruh kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara;</li> <li>2. menyusun laporan triwulan atas kasus-kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara dan menyampaikan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) melalui panitera;</li> <li>3. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk segera melaporkan dan memproses kasus kerugian daerah kepada BPK sesuai dengan ketentuan;</li> <li>4. membantu Pemda dalam melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan Majelis TP dalam proses Penuntutan Perbendaharaan;</li> <li>5. memantau perkembangan proses tuntutan perbendaharaan atas kasus-kasus yang telah disampaikan ke Majelis TP untuk kelancaran dan percepatan proses penyelesaian kasus kerugian negara/daerah;</li> <li>6. membantu pengembangan fitur dalam aplikasi Sistem Kerugian Negara/Daerah;</li> <li>7. mendokumentasikan seluruh kegiatan Sekretariat Kerugian</li> </ol>	<p>dan terpadu kepada pemangku kepentingan</p>	

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
		Negara/Daerah; dan 8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perwakilan.		

# Kepala Perwakilan

**Kepala Perwakilan (Periode Juli 2019 s.d. Sekarang)**

Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA (*Pembina Utama Madya (IV/d)*)



Bapak Arif Agus lahir di Bekasi tanggal 29 Agustus 1968 sekarang menjabat sebagai Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

## **Riwayat Pekerjaan:**

- Kepala Seksi II.A.2.1 Auditorat Keuangan Negara II Tahun 2001;
- Kepala Sub Auditorat II.B.2 Auditorat Keuangan Negara II Tahun 2006;
- Kepala Sub Auditorat II.C.2 Auditorat Keuangan Negara II Tahun 2007;
- Kepala Sub Auditorat Banten, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007;
- Kepala Sub Auditorat Banten, BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2008;
- Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh Tahun 2011;
- Kepala Auditorat VII.B, Auditorat Keuangan Negara VII Tahun 2012;
- Kepala Auditorat VII.B, Auditorat Keuangan Negara VII Tahun 2014;
- Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016;
- Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Tahun 2018;
- Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh Tahun 2019;
- Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, Auditorat Keuangan Negara V Tahun 2021;
- Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Agustus 2022 s.d. sekarang.

# Kepala Perwakilan

## dari Masa ke Masa

### **Kepala Perwakilan (Periode Oktober 2007 s.d. Maret 2011)**

*Drs.H. Maulana Ginting, M.Si. (Pembina Utama Muda/IV C)*



Bapak Maulana Ginting lahir di Medan, 5 Oktober 1961, memiliki seorang Istri drg.Trelia Boel, M.Kes, Sp.RKG. dan dua orang anak yaitu Aulia Rizki dan Dinda Maurelova.

Riwayat Pekerjaan : Administrasi Umum di Perwakilan BPK RI di Medan 1986, Pemeriksa Muda pada Perwakilan BPK RI di Medan 1987, Pengukuhan Pemeriksa Muda Perwakilan RI di Medan 1994, Pemeriksa Muda pada AKN IV Medan 1994, Kepala Seksi Departemen Dalam Negeri pada Auditama Keuangan Negara IV 1996, Pemeriksa pada Angk.IV 1996, Kepala Seksi Pertamina-2 pada AKN V 1997, Pembebasan Sebagai Auditor Ahli Muda 1997, Kepala Seksi Provinsi Dati I Riau pada Pwk.I di Medan 1999, Kepala Sub Auditorat Perwakilan I-A 2001, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NAD 2005, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007.

### **Kepala Perwakilan (Periode Maret 2011 s.d. September 2015)**

*Betty Ratna Nuraeny, S.H. (Pembina Utama Madya/IV D)*



Ibu Betty Ratna Nuraeny lahir di Sumedang, 11 Maret 1957, memiliki Suami Deddy Lufti Amin dan tiga orang anak yaitu Amelia Safitri, Widya Fitriani dan Kartika Fitriyanti.

Riwayat Pekerjaan : Administrasi Umum di Auditorat ODIT D pada BPK RI Pusat 1984, Pemeriksa Muda di Auditorat ODIT D 1986, Pemeriksa di Auditorat ODIT 1993, Kasub Bagian Sekretariat Irtama Wasinsus 1994, Pemeriksa di Inspektorat Litbang 1994, Auditor Ahli Muda 1997, Kepala Unit Pemeriksa di Sub Bagian Pengangkatan, Kepangkatan dan Penggajian 2001, Kepala Unit Pemeriksa di Inspektorat Utama Wasinsus, Kepala Bidang di bidang Waslak Penunjang, Kepala Bidang di Bidang I.C, Pemeriksa Utama di Auditorat VI.B, Kepala Auditorat di Auditorat VI.B, Auditor Ahli Madya di Auditorat V.B, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.

## **Kepala Perwakilan (Periode Oktober 2015 s.d. September 2016)**

*Eldy Mustafa, S.H. (Pembina Utama Muda/IV C)*



Bapak Eldy Mustafa lahir di Sungayang, 18 September 1956, memiliki seorang Istri Halimatusadyah dan tiga orang anak Nully Musdyah, Fella Eldiyah dan Lazuardo Eldy.

Riwayat Pekerjaan : Administrasi umum Tahun 1986, Pemeriksa Muda Tahun 1987, Kepala Sub Bagian Umum Tahun 1996, Kepala seksi Tahun 1997 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Sekretariat Perwakilan Tahun 2006 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Sub Auditorat Tahun 2008 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan pada BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2012 dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

## **Kepala Perwakilan (Periode Oktober 2016 s.d. Juli 2017)**

*Eliza, M.M., Ak., CA. (Pembina Utama Muda/IV C)*

Ibu Eliza lahir di Medan, 2 Juli 1963, memiliki seorang Suami M. Endy Arifin dan dua orang anak yaitu Sanindya Lesario Arifin dan Fadila Rachmadhani



Riwayat Pekerjaan : Administrasi Umum pada Oditorat I Tahun 1991, Pemeriksa Muda pada Sub Auditorat V.A.2 Tahun 1994, Pemeriksa pada Auditorat Keuangan Negara V Tahun 1998, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemeriksaan BUMN pada Inspektorat Utama Renalev. Tahun 1999, Kepala Seksi BUMN Jasa Perhubungan Udara dan Darat pada Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2001, Kepala Sub Auditorat III.A.2 Tahun 2007,

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Tahun 2012 dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

### **Kepala Perwakilan (Periode Agustus 2017 s.d. Juli 2019)**

*Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak. (Pembina Tk.I/IV B)*



Bapak Pemut Aryo Wibowo lahir di Madiun, 3 April 1971, memiliki Istri Dharyanti dan dua orang anak yaitu Muhammad Athmar Athaya dan Agung Arif Wicaksono.

Riwayat Pekerjaan : Administrasi Umum pada AKN IV Tahun 1997, Pemeriksa Muda pada AKN IV Tahun 2004, Kepala Seksi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006, Kepala Sub Auditorat Kalimantan Timur II pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur IV pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, Kepala Auditorat IV.C Tahun 2016, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

### **Kepala Perwakilan (Periode Juli 2019 s.d. Juli 2022)**

*Yusnadewi S.E., M.Si., AK., CSFA (Pembina Utama Madya (IV/d))*



Ibu Yusnadewi lahir di Banda Aceh tanggal 2 Desember 1970 sekarang menjabat sebagai Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Riwayat Pekerjaan: Kepala Seksi I.A.2 Perwakilan BPK RI di Medan Tahun 2002, Kepala Seksi Sumatera Utara I Tahun 2004, Kepala Sub Auditorat Perwakilan Medan Tahun 2006, Kepala Sub Auditorat V.A Tahun 2011, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu Tahun 2014, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Tahun 2016, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Juli 2019 s.d. sekarang.

## **Kepala Perwakilan (Periode Juli 2022 s.d. sekarang)**

*Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA (Pembina Utama Madya, IV/d)*



Bapak Arif Agus lahir di Bekasi tanggal 29 Agustus 1968 sekarang menjabat sebagai Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Riwayat Pekerjaan: Kepala Seksi II.A.2.1 AKN II Tahun 2001, Kepala Sub Auditorat II.B.2 AKN II Tahun 2006, Kepala Sub Auditorat II.C.2 AKN II Tahun 2007, Kepala Sub Auditorat Perwakilan DKI Jakarta Tahun 2007, Kepala Sub Auditorat Perwakilan Banten Tahun 2008, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh Tahun 2011, Kepala Auditorat VII.B AKN VII Tahun 2012, Kepala Auditorat VII.B AKN VII Tahun 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu Tahun 2018, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh Tahun 2019, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan AKN V Tahun 2021, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

# Badan Pemeriksa Keuangan

## PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT



# Keluarga Besar

## BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat



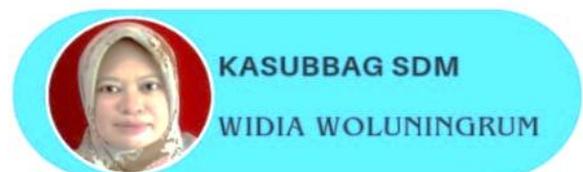
## BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, membantu dalam Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK, Perumusan rencana kegiatan, Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah, Penyusunan program, pelaksanaan, dan Pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah, Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, Pengevaluasian Kegiatan pemeriksaan, Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK, Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan, Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah, Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum, Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan Pelaporan Hasil kegiatan secara berkala di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

## Sekretariat Perwakilan

Sesuai Surat Keputusan BPK RI No.3/K/I-XIII.2/7/2014 Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas penyelenggaraan dan melaksanakan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya, keuangan, dan sarana prasarana untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.



## ***Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan***

Pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Humas dan TU Kalan meliputi kegiatan pelayanan yang bersifat internal (ke-TU-an) dan eksternal (kehumasan) termasuk pengelolaan perpustakaan dan protokoler serta publikasi, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.



### ***Layanan Perpustakaan***

Peningkatan layanan perpustakaan dengan melakukan relokasi ruangan yang lebih strategis dan nyaman dengan ditunjang oleh Sistem Aplikasi SiPuspa yang berisi referensi yang Update dan mudah diakses.

### ***Kehumasan***

- Pusat informasi dan komunikasi dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
- Website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memuat informasi yang dilaksanakan oleh pimpinan kantor, Kepala Perwakilan, dan kegiatan lain sebagai sarana komunikasi dan *sharing* informasi antara intern di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- *Media Relation* dilakukan dalam rangka monitoring pemberitahuan BPK dengan melakukan hubungan baik pada media setempat serta menyediakan bahan tulisan (press release) saat pelaksanaan kegiatan penyerahan LHP kepada entitas.

### *Keprotokolan*

Keprotokolan dilakukan untuk mendukung kegiatan di Kantor Perwakilan dan kegiatan pendampingan pimpinan untuk menghadiri acara yang diadakan di luar kantor.

### *Kesekretariatan*

Kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kantor Perwakilan dengan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta melakukan penatausahaan dan membantu kelancaran administrasi Kepala Perwakilan.

### *Subbagian Sumber Daya Manusia*

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyusun daftar kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, memproses kenaikan pangkat, kenaikan gaji, administrasi gaji, remunerasi, taspen, bpjs, mengusulkan calon penerima penghargaan, pengelolaan sistem presensi, database SISDM, manajemen kinerja serta pengelolaan obat klinik BPK Perwakilan dsb.



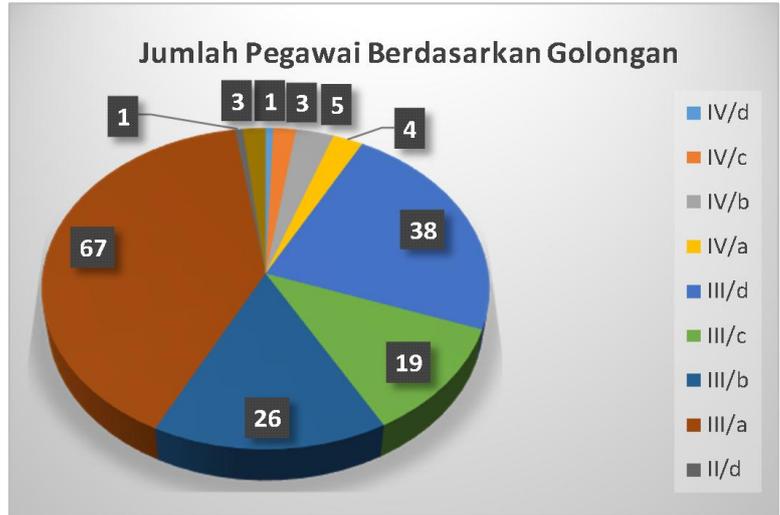
### *Dukungan Sumber Daya Manusia*

Sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Bezzeting Pegawai per 31 Desember 2022 berjumlah sebanyak 167 orang yang terdiri dari:

- |    |                               |   |                             |
|----|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | Kepala Perwakilan             | : | 1 (satu) orang              |
| 2. | Kepala Sekretariat Perwakilan | : | 1 (satu) orang              |
| 3. | Kepala Sub Auditorat          | : | 2 (dua) orang               |
| 4. | Kepala Sub Bagian             | : | 5 (lima) orang              |
| 5. | Pemeriksa                     | : | 90 (Sembilan puluh) orang   |
| 6. | Staf Sekretariat              | : | 31 (tiga puluh satu) orang  |
| 7. | CPNS                          | : | 37 (tiga puluh tujuh) orang |

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV/d	1	1%
2	IV/c	3	2%
3	IV/b	5	3%
4	IV/a	4	2%
5	III/d	38	23%
6	III/c	19	11%
7	III/b	26	16%
8	III/a	67	40%
9	II/d	1	1%
10	II/c	3	2%
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>	<b>100%</b>



### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	34	20%
2	S1/D4	123	74%
3	D3	9	5%
4	SLTA/SMK	1	1%
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>	<b>100%</b>



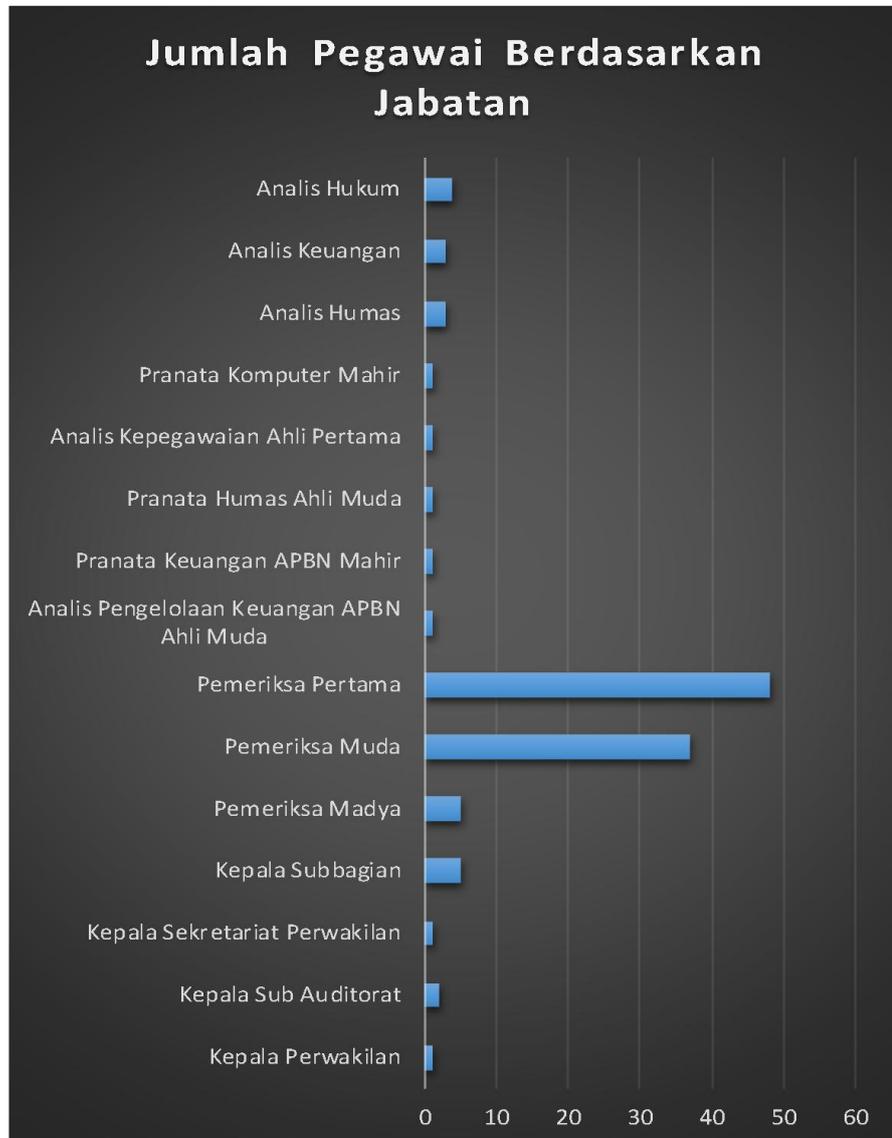
### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	91	54%
2	Perempuan	76	46%
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>	<b>100%</b>



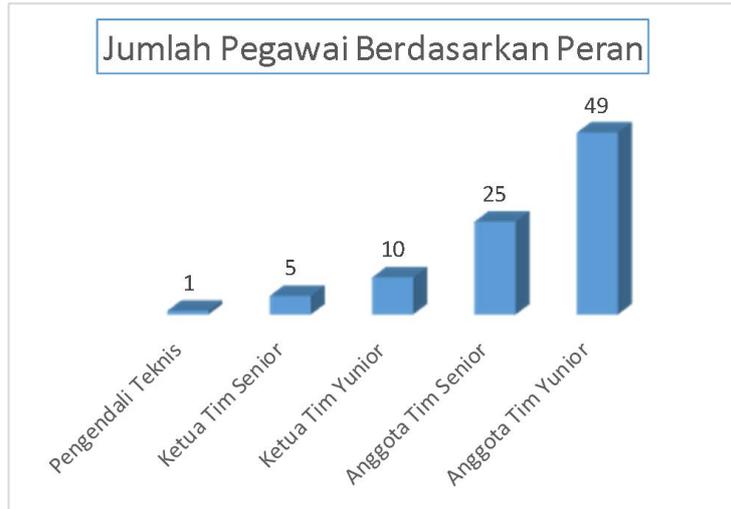
### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Perwakilan	1
2	Kepala Sub Auditorat	2
3	Kepala Sekretariat Perwakilan	1
4	Kepala Subbagian	5
5	Pemeriksa Madya	5
6	Pemeriksa Muda	37
7	Pemeriksa Pertama	48
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
9	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
10	Pranata Humas Ahli Muda	1
11	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1
12	Pranata Komputer Mahir	1
13	Analisis Humas	3
14	Analisis Keuangan	3
15	Analisis Hukum	4
16	Analisis Aparatur SDM	6
17	Analisis Barang Milik Negara	1
18	Pengelola Kepegawaian	1
19	Pengelola Keuangan	2
20	Sekretaris	1
21	Pengelola Barang Milik Negara	2
22	Penyuluh Kearsipan	1
23	Pengadministrasi Umum	1
24	Pranata Komputer Terampil	1
25	CPNS	37
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>



### Jumlah Pegawai Berdasarkan Peran

No	Peran	Jumlah	Persentase
1	Penanggung Jawab	0	0%
2	Pengendali Mutu	0	0%
3	Pengendali Teknis	1	1%
4	Ketua Tim Senior	5	6%
5	Ketua Tim Yunior	10	11%
6	Anggota Tim Senior	25	28%
7	Anggota Tim Yunior	49	54%
Jumlah		90	100%



## Subbagian Keuangan

Tugas Subbagian Keuangan meliputi kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.



### Realisasi Anggaran

Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp26.752.158.000,00.

Dari alokasi anggaran tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mampu merealisasikannya sebesar Rp26.333.628.864,00 atau sebesar 98,4%. Berikut adalah anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022:

<b>IKU</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	411.295.000,00	407.123.218,00
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	6.111.602.000,00	5.844.235.561,00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	561.044.000,00	539.729.800,00
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	1.094.118.000,00	1.018.326.900,00
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	48.753.000,00	46.560.762,00
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	583.011.000,00	538.074.495,00
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	63.069.000,00	48.304.576,00
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	13.518.343.000,00	13.451.672.379
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	309.603.000,00	307.786.312,00
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	20.188.000,00	20.101.965,00
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	271.019.000,00	270.751.319,00
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	114.781.000,00	205.228.695,00
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	275.042.000,00	273.048.120,00
		26.752.158.000,00	26.333.628.864,00

## Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum, pengelolaan arsip, memproses pengadaan barang jasa, mengadministrasikan dan memelihara Barang Milik Negara serta hal-hal yang berkaitan dengan layanan umum lainnya.



### *Barang Milik Negara*

#### **131111 Tanah**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
2.01.01	Tanah Persil	9.580	32.114.500.000

#### **132111 Peralatan dan Mesin**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
3.01.03	Alat Bantu	11	2.546.395.000
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	1.891.262.250
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	4	153.249.500
3.03.03	Alat Ukur	19	222.352.000
3.05.01	Alat Kantor	397	3.811.201.463
3.05.02	Alat Rumah Tangga	1.207	6.771.722.389
3.06.01	Alat Studio	71	384.360.920
3.06.02	Alat Komunikasi	61	341.219.268
3.06.03	Peralatan Pemancar	2	267.929.991
3.07.01	Alat Kedokteran	57	60.811.172
3.07.02	Sepeda Statis	1	3.954.720

**132111 Peralatan dan Mesin**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	15	1.558.284.924
3.10.01	Komputer Unit	113	1.896.153.801
3.10.02	Peralatan Komputer	246	2.526.815.063
3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	4	119.527.292

**133111 Gedung dan Bangunan**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	18	22.738.007.280
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10	3.360.254.510
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	4	429.180.400

**134112 Irigasi**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	2	163.021.000
5.02.07	Bangunan Air Kotor	1	5.341.000

**134113 Jaringan**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
5.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	1	274.225.768
5.03.02	Instalasi Air Kotor	1	544.643.321
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	2	3.137.933.485
5.03.09	Instalasi Pengaman	1	15.432.833
5.03.10	Instansi Lain	4	677.221.634
5.04.02	Jaringan Listrik	1	106.315.825
5.04.03	jaringan telepon	1	184.607.781

**135121 Aset Tetap Lainnya**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.958	144.100.134
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	5	37.049.000

**162151 Software**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
8.01.01	Aset Tak Berwujud	3	354.939.500

**162161 Lisensi**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
8.01.01	Aset Tak Berwujud	12	123.316.908

## Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan legislasi atas produk hukum, mereviu tulisan hukum, mengelola Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, memberikan konsultasi atau pendapat hukum, memantau penanganan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, mereviu proses penyelesaian laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah, mereviu pemberian bantuan hukum kepada pegawai yang diminta memberi keterangan ahli dan sebagainya.



### Legislasi

Kegiatan layanan legislasi yaitu berupa pemberian layanan dalam penyusunan produk hukum pada BPK Perwakilan. Produk hukum tersebut meliputi Keputusan, Instruksi Dinas, Surat Edaran, dan lain - lain yang menjadi kewenangan BPK Perwakilan. Tahapan layanan legislasi mulai dari penyampaian usulan oleh unit kerja pengusul sampai penetapan produk hukum. Dalam Tahun 2022, telah diproses sebanyak 64 Keputusan dan 7 Instruksi Dinas Kepala Perwakilan.

### Konsultasi Hukum

Kegiatan konsultasi hukum sering disebut juga dengan kegiatan telaahan hukum yang dilakukan dalam hal terdapat permintaan konsultasi, telaahan atau pendapat hukum atas temuan pemeriksaan atau hal - hal yang terkait dengan pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskusi atau konsultasi yang dilakukan bersama - sama dengan melibatkan pegawai pada Subbagian Hukum.

### **Bantuan Hukum**

Pemberian layanan bantuan hukum dilakukan dalam hal yang terdapat permintaan bantuan, hukum dari unit kerja terkait untuk pejabat/ pemeriksa / pegawai BPK Perwakilan. Bantuan hukum dapat dilakukan dengan memberikan masukan/ diskusin dari aspek hukum dalam suatu persoalan dan pendampingan hukum dalam proses pemberian keterangan ahli baik dalam proses penyidikan dan proses sidang pengadilan.

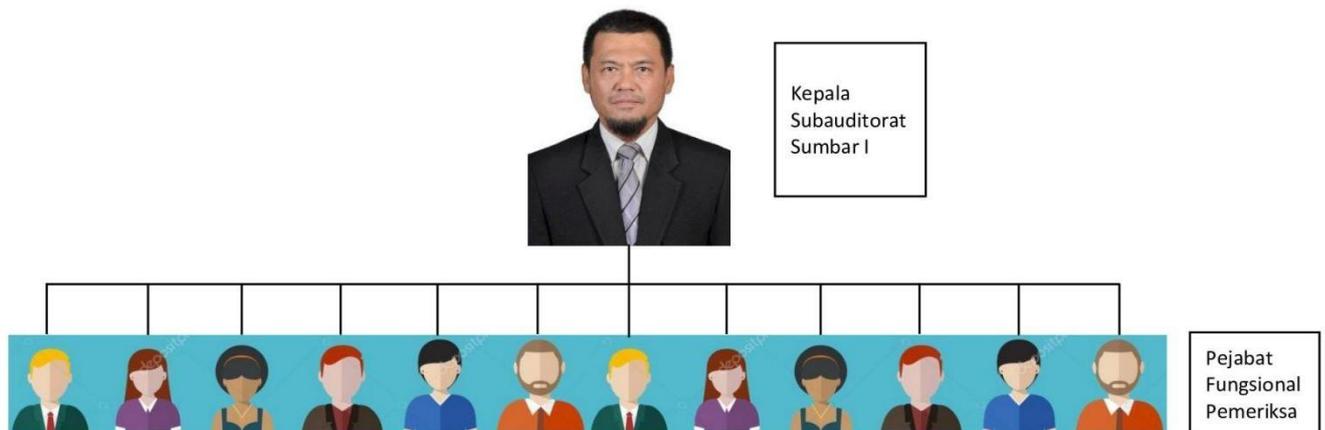
### **Informasi Hukum**

Kegiatan informasi hukum dilakukan dengan cara memberikan peraturan perundang – undangan atau produk hukum internal BPK yang diminta oleh pegawai BPK. Kegiatan informasi hukum ini termasuk pula melakukan koordinasi atau kerja sama dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu. Hasil kerja sama dengan JDIH Provinsi/Kabupaten/ Kota yaitu berupa diperolehnya produk hukum Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan di unggah di situs <http://padang.bpk.go.id>, khususnya dalam bagian UJDIH.

## Subauditorat Sumbar I

Subauditorat Sumbar I mempunyai tugas mereviu RKP dan LHP yang dilaksanakan, mereviu konsep hasil pementauan penyelesaian kerugian daerah, memantau kegiatan pemeriksaan, mengompilasi dan mereviu bahan evaluasi Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, melakukan pembahasan, memantau dan mengompilasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyusun perumusan bahan pendapat, memutakhirkan data manajemen dan profil pemeriksaan, menyiapkan bahan penyusunan LAK dan melaksanakan pemeriksaan pada 10 entitas yaitu:

- |   |                      |    |                 |
|---|----------------------|----|-----------------|
| 1 | Provinsi Sumbar      | 6  | Kab. Sijunjung  |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 7  | Kab. Solok      |
| 3 | Kab. Dharmasraya     | 8  | Kota Pariaman   |
| 4 | Kab. Kep. Mentawai   | 9  | Kota Solok      |
| 5 | Kab. Solok Selatan   | 10 | Kota Sawahlunto |



## Subauditorat Sumbar II

Subauditorat Sumbar II mempunyai tugas mereviu RKP dan LHP yang dilaksanakan, mereviu konsep hasil pementauan penyelesaian kerugian daerah, memantau kegiatan pemeriksaan, mengompilasi dan mereviu bahan evaluasi Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, melakukan pembahasan, memantau dan mengompilasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyusun perumusan bahan pendapat, memutakhirkan data manajemen dan profil pemeriksaan, menyiapkan bahan penyusunan LAK dan melaksanakan pemeriksaan pada 10 entitas yaitu:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Kab. Pasaman        | 6 Kab. Padang Pariaman |
| 2 Kab. Pasaman Barat  | 7 Kota Padang Panjang  |
| 3 Kab.Lima Puluh Kota | 8 Kota Bukittinggi     |
| 4 Kab. Agam           | 9 Kota Padang          |
| 5 Kab. Tanah Datar    | 10 Kota Payakumbuh     |



**Informasi**

**Pemeriksaan**

# Informasi Pemeriksaan

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

## Jenis-jenis Pemeriksaan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan:

### Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektitas sistem pengendalian intern

Kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan yang ada dalam RKP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2020 yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 pada dua puluh entitas:

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Provinsi Sumatera Barat   | 11. Kota Pariaman                |
| 2. Kabupaten Dharmasraya     | 12. Kabupaten Tanah Datar        |
| 3. Kabupaten Lima Puluh Kota | 13. Kabupaten Padang Pariaman    |
| 4. Kabupaten Solok Selatan   | 14. Kota Sawahlunto              |
| 5. Kabupaten Pasaman Barat   | 15. Kota Payakumbuh              |
| 6. Kabupaten Pasaman         | 16. Kabupaten Pesisir Selatan    |
| 7. Kota Bukittinggi          | 17. Kota Solok                   |
| 8. Kota Padang Panjang       | 18. Kabupaten Solok              |
| 9. Kabupaten Agam            | 19. Kabupaten Sijunjung          |
| 10. Kota Padang              | 20. Kabupaten Kepulauan Mentawai |

## Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan/entitas dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen dan mengambil tindakan koreksi, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Kegiatan pemeriksaan kinerja yang ada dalam RKP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan telah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2022 sebanyak 3 tiga, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Rangka (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 s.d triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Solok di Solok
2. Pemeriksaan Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kota Pariaman dan Instansi Terkait Lainnya di Pariaman
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 s.d. Oktober 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

## *Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu*

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), revidu, atau prosedur yang disepakati. Sebagian besar PDTT yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi yaitu pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria.

Kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ada dalam RKP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan telah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2022 sebanyak sembilan, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung
3. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
4. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (Blt Desa) Tahun Anggaran 2022 Pada Kabupaten Solok Dan Instansi Terkait Lainnya
5. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
6. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan 2022 Pada Pemerintah Kota Padang
7. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
8. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
9. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Agam

## Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan laporan keuangan menghasilkan opini atas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas yang diperiksa. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa sebagai hasil pemeriksaan keuangan meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTPDPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hasil pemeriksaan atas LKPD yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir (2018-2022) dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Hasil pemeriksaan atas LKPD yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir per entitas adalah sebagai berikut:

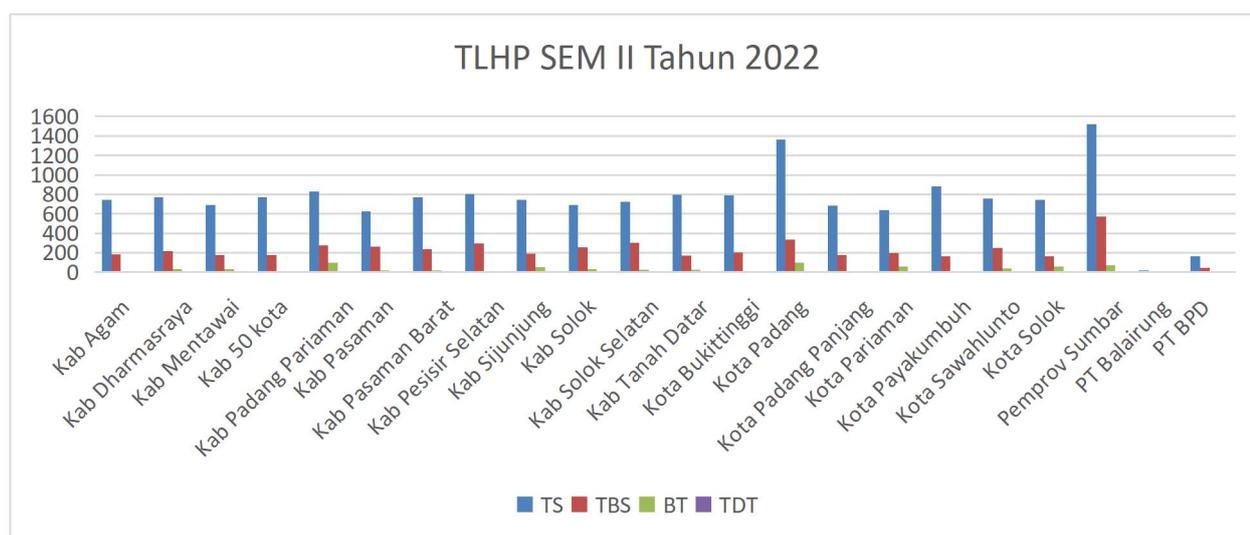
No	Entitas	Opini Pemeriksaan LKPD				
		TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
1	Provinsi Sumatera Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Tanah Datar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Padang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Pesisir Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kota Bukittinggi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Pasaman Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Agam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kota Payakumbuh	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kota Sawahlunto	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Solok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kota Padang Panjang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Pasaman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten Dharmasraya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kota Pariaman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kabupaten Sijunjung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Solok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kabupaten Padang Pariaman	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kabupaten Lima Puluh Kota	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kabupaten Solok Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kabupaten Kepulauan Mentawai	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP

## Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (*auditee*) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan dua kali pemantauan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 20 entitas pada Semester I tanggal 10 Juni 2022 dan Semester II tanggal 8 Desember 2022.

Berdasarkan rekapitulasi data dari TLHP Sem II 2022, nilai Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah sebesar 74,71% dengan rincian 16.520 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 4.866 rekomendasi belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti, 730 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 10 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sebagai berikut:



## Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

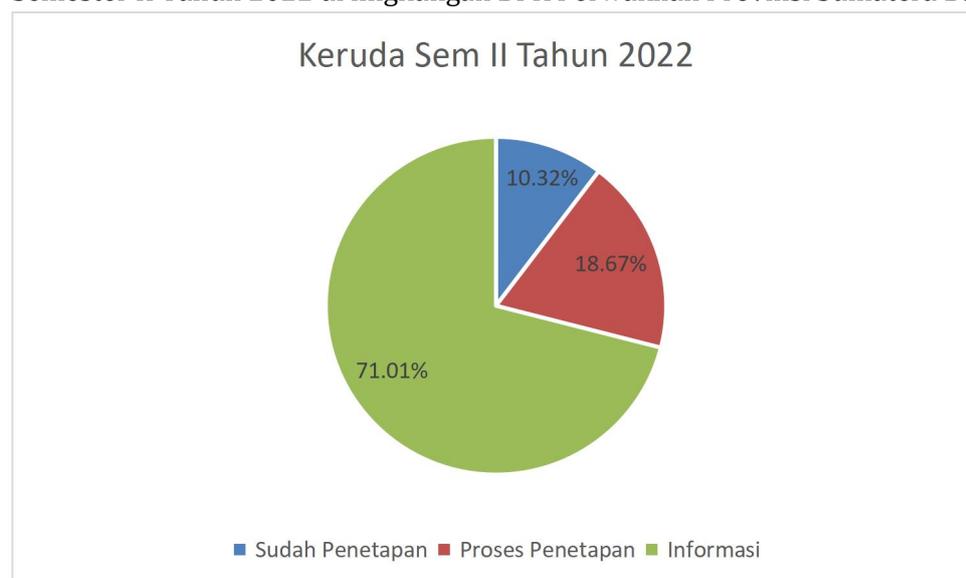
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah agar penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi terlaksana secara efektif. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS nonbendaharawan dan pihak ketiga.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan atas kerugian negara/daerah yang berasal dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada 20 entitas. Berdasarkan hasil rekapitulasi, sampai dengan semester II tahun 2022, nilai total kerugian daerah adalah sebesar Rp473.812.723.315,00 dan telah lunas pembayarannya sebesar Rp311.424.494.764,00.

No	Uraian	Nilai	Sudah Penetapan	Proses	Informasi	Pembayaran	Sisa
----	--------	-------	-----------------	--------	-----------	------------	------

				Penetapan			
1	Kabupaten Pesisir Selatan	17.557.408.733	313.324.413	3.861.317.037	13.382.767.283	11.188.344.608	6.369.064.125
2	Provinsi Sumatera Barat	104.211.446.685	10.600.275.063	52.652.964.244	40.958.207.378	92.035.231.487	12.176.215.197
3	Kota Solok	10.493.083.360	1.944.669.355	1.444.596.319	7.103.817.687	7.542.878.658	2.950.204.702
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	15.187.526.805	293.603.000	2.140.821.195	12.753.102.610	13.465.898.472	1.721.628.333
5	Kabupaten Agam	9.412.704.826	590.896.712	1.171.603.092	7.650.205.022	7.763.984.508	1.648.720.318
6	Kabupaten Kepulauan Mentawai	34.206.676.743	1.677.540.715	5.429.020.706	27.100.115.313	18.151.023.352	16.055.653.391
7	Kabupaten Padang Pariaman	17.592.455.006	12.135.000		17.580.320.006	10.480.603.678	7.111.851.328
8	Kabupaten Pasaman Barat	39.473.429.023	515.055.750	317.057.792	38.641.315.481	16.480.988.506	22.992.440.516
9	Kabupaten Pasaman	25.060.547.171	-	1.323.509.992	23.737.037.178	12.460.691.602	12.599.855.569
10	Kabupaten Sijunjung	15.835.349.907	519.357.608	2.894.199.690	12.421.792.609	12.048.057.753	3.787.292.154
11	Kabupaten Solok Selatan	59.246.110.162	22.881.878.985	428.973.948	35.935.257.229	32.151.305.851	27.094.804.310
12	Kabupaten Solok	21.611.784.387	485.177.100	1.112.472.467	20.014.134.820	10.650.958.406	10.960.825.981
13	Kabupaten Tanah Datar	6.965.742.137	422.888.357	424.071.459	6.118.782.321	3.079.648.433	3.886.093.704
14	Kota Bukittinggi	10.969.803.860	1.709.397.864	447.580.801	8.812.825.195	8.503.860.120	2.465.943.740
15	Kota Padang Panjang	14.448.772.277	63.917.345	150.658.390	14.234.196.542	9.431.425.230	5.017.347.047
16	Kota Padang	22.593.063.275	1.394.340.548	426.908.663	20.771.814.065	11.610.623.582	10.982.439.693
17	Kota Pariaman	10.679.167.741	-	934.069.435	9.745.098.306	5.996.767.263	4.682.400.477
18	Kota Payakumbuh	6.018.448.408	20.004.900	1.019.733.108	4.978.710.400	3.806.103.988	2.212.344.420
19	Kota Sawahlunto	15.133.908.434	3.260.615.395	539.425.362	11.333.867.676	9.698.405.542	5.435.502.891
20	Kabupaten Dharmasraya	17.115.294.376	2.203.154.343	11.736.431.434	3.175.708.600	14.885.693.722	2.229.600.655
	<b>Jumlah</b>	<b>473.812.723.315</b>	<b>48.908.232.453</b>	<b>88.455.415.133</b>	<b>336.449.075.720</b>	<b>311.432.494.764</b>	<b>162.380.228.552</b>

Berikut diagram lingkaran yang dapat menggambarkan Data Pemantauan Keruda per Semester II Tahun 2022 di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat:



# **Entitas**

# **Pemeriksaan**

# Provinsi Sumatera Barat



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958

## Ibukota

Kota Padang

## Alamat Kantor Gubernur

Jl. Jenderal Sudirman, No.15, Jati Baru,  
Padang Timur, Padang Pasir, Padang Bar.,  
Kota Padang, Sumatera Barat 25129

## Alamat Kantor DPRD

Jl. S. Parman No.221, Ulak Karang Utara,  
Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

## Luas Wilayah

42.297,30 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2010)

4.846.909 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

12 Kabupaten dan 7 Kota dengan 147  
Kecamatan dan 877 Kelurahan  
41 SKPD dan 7 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : provinsi sumatera utara  
Selatan : provinsi jambi  
Barat : samudera hindia  
Timur : provinsi riau

## Website

[www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : Supardi  
Wakil Ketua I : H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed  
Wakil Ketua II : H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH, M.M  
Wakil Ketua III: H. Suwirpen Suib, S.Sos

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : H. Mahyeldi Ansharullah, SP Dt. Marajo  
Wakil Kepala Daerah : Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, M.M, IPM, ASEAN.Eng  
Sekretaris Daerah : Drs. H. Hansastri, Ak., M.M., CFrA  
Inspektur : Delliarti S. M, S.E., A.k., C.A., CFrA

**Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	11.831.024.632.655,00	325.613.857.560,88	11.505.410.775.094,10
2021	11.299.270.317.188,80	407.122.182.205,96	10.892.148.134.982,90
2020	10.661.142.348.895,90	382.136.934.823,28	10.279.005.414.072,60
2019	10.896.093.672.232,80	289.469.831.446,49	10.606.623.840.786,30
2018	10.618.211.428.227,00	293.281.944.852,30	10.324.929.483.374,70
2017	10.746.879.602.265,00	224.544.601.805,67	10.522.335.000.459,30
2016	8.152.807.500.452,42	183.339.616.278,28	7.969.467.884.174,14
2015	7.168.026.165.849,71	173.654.547.551,94	6.994.371.618.297,77
2014	9.684.014.728.536,24	159.530.637.486,80	9.524.484.091.049,44

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	6.175.628.018.183,00	6.639.308.547.776,00	6.130.023.203.347,60	6.304.434.742.047,81
2021	6.652.314.674.092,00	6.898.114.698.298,00	6.706.053.462.904,89	429.208.039.952,63
2020	6.421.814.751.636,00	5.964.110.587.546,59	6.364.065.756.244,41	5.642.976.228.598,93
2019	6.607.003.065.730,00	6.050.552.689.161,72	6.390.337.204.584,19	5.640.332.373.436,32
2018	6.464.256.196.560,00	5.883.475.884.676,77	6.292.287.631.025,90	5.462.759.063.270,09
2017	6.132.481.349.250,00	5.499.761.868.931,98	6.066.826.853.956,41	4.912.514.633.429,62
2016	4.630.406.536.915,00	4.806.903.528.388,86	4.624.674.545.939,55	4.504.037.258.760,43
2015	4.036.155.306.941,00	4.232.659.950.677,00	4.052.249.308.119,38	4.022.256.960.382,22
2014	3.522.329.927.000,00	3.009.281.567.816,94	3.635.837.760.819,71	2.842.088.440.186,95

Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini.

Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Fasilitas wisatanya yang cukup baik, serta sering diadakannya berbagai festival dan even internasional, menjadi pendorong datangnya wisatawan ke provinsi ini. Beberapa kegiatan internasional yang diselenggarakan untuk menunjang pariwisata Sumatera Barat adalah lomba balap sepeda Tour de Singkarak, even paralayang Event Fly for Fun in Lake Maninjau, serta kejuaraan selancar Mentawai International Pro Surf Competition.

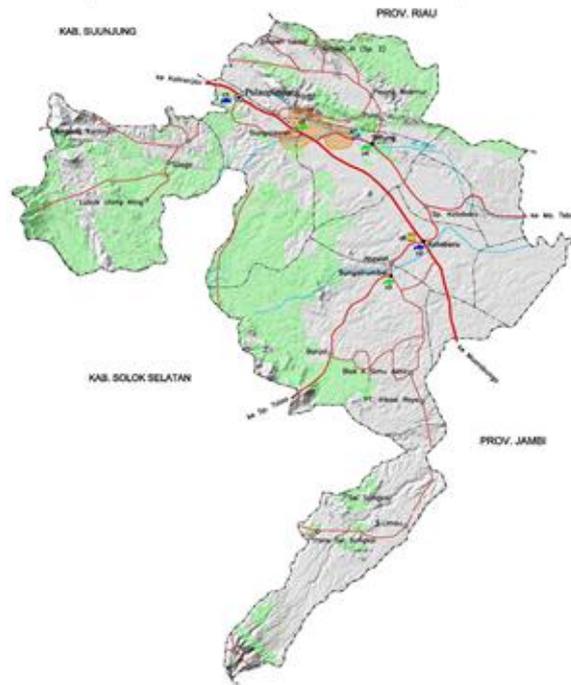
Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis objek wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan ngarai. Selain itu pariwisata Sumatera Barat juga banyak menjual budayanya yang khas, seperti Festival Tabuik, Festival Rendang, permainan kim, dan seni bertenun. Disamping wisata alam dan budaya, Sumatera Barat juga terkenal dengan wisata kulinernya.

Untuk berbagai informasi serta literatur sejarah dan kebudayaan Minangkabau, wisatawan dapat memperolehnya di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang terletak di Perkampungan Minangkabau, Padang Panjang. Di PDIKM terdapat berbagai dokumentasi berupa foto mikrograf, surat kabar, pakaian tradisional, kaset rekaman lagu daerah, dokumentasi surat-surat pemerintahan, dan alur sejarah masyarakat Minangkabau sejak abad ke-18 hingga tahun 1980-an.

Rumah adat Sumatera Barat khususnya dari etnis Minangkabau disebut Rumah Gadang. Rumah Gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku/kaum tersebut secara turun temurun. Tidak jauh dari komplek rumah gadang tersebut biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat tinggal lelaki dewasa kaum tersebut namun belum menikah.



# Kabupaten Dharmasraya



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

## Ibukota

Pulau Punjung

## Alamat Kantor Bupati

Jalan Lintas Sumatera pulau punjung

## Alamat Kantor DPRD

Gn. Medan, Sitiung, Dharmasraya, Gn.  
Medan, Sitiung, Kabupaten Dharmasraya,  
Sumatera Barat 27678

## Luas Wilayah

296.113 ha

## Jumlah Penduduk (2010)

191.422 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

11 Kecamatan, 52 Nagari  
39 SKPD dan 1 BUMD.

## Batas Wilayah

- Utara : Kab. Swl/Sijunjung & Kab.  
Kuantan Singingi – Riau
- Selatan : Kab. Bungo & Kerinci  
Propinsi Jambi
- Barat : Kab. Solok & Kab. Solok  
Selatan
- Timur : Kab. Bungo & Tebo Prov.  
Jambi

## Website

[www.dhamasrayakab.go.id](http://www.dhamasrayakab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : Pariyanto, S.H.  
Wakil Ketua I : Ir . H. Adi Gunawan, M.M.  
Wakil Ketua II : Ade Sudarman, S. P. D.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.  
Wakil Kepala Daerah : Drs. H. Dasril Panin Datuak Labuan  
Sekretaris Daerah : H. Adlisman, S.Sos.,M.Si  
Plt. Inspektur : Kandam, S.Sos

**Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	2.474.613.185.317,86	16.553.933.658,25	2.458.059.251.656,61
2021	2.506.115.489.910,43	18.045.680.349,38	2.488.069.809.561,05
2020	2.382.449.848.334,09	35.955.981.923,07	2.346.493.866.411,02
2019	2.453.074.205.588,30	28.629.183.585,27	2.424.445.022.003,03
2018	2.429.453.615.523,15	20.532.747.157,88	2.408.920.868.365,27
2017	2.239.704.586.406,88	28.155.677.075,10	2.211.548.909.331,78
2016	2.119.569.745.404,46	17.745.097.191,33	2.101.824.648.213,13
2015	1.867.848.423.388,94	40.997.130.880,72	1.826.851.292.508,22
2014	1.463.957.910.211,65	22.156.020.315,00	1.441.801.889.896,65

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	918.477.642.858,00	878.044.227.027,00	911.076.883.278,80	829.320.612.705,35
2021	980.426.098.722,00	875.664.807.043,00	978.920.717.101,87	805.124.115.082,65
2020	1.013.848.877.651,00	909.254.418.634,32	990.191.146.482,12	878.479.570.779,95
2019	1.064.900.986.783,00	966.583.860.859,00	1.019.358.071.248,49	917.364.843.711,15
2018	933.007.066.327,00	858.958.760.196,00	923.540.952.021,88	826.104.720.715,14
2017	976.912.734.168,00	893.767.544.754,00	949.023.480.858,55	834.307.938.503,00
2016	955.018.041.345,00	903.206.731.310,23	875.195.933.215,60	804.052.988.144,92
2015	811.684.636.980,00	798.464.612.321,00	794.425.975.047,00	752.811.152.229,00
2014	709.415.189.737,00	709.042.912.885,00	687.279.316.499,12	652.470.659.806,00

Potensi wilayah Kabupaten Dharmasraya antara lain bidang perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Di samping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, coklat, cengkih, dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan sebagainya.

Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Ditunjang dengan posisi strategisnya di Sumatera (dilintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera sepanjang 100 km), maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa. Pada Tahun 2014 sampai 2015, batu cincin sedang digemari oleh masyarakat, batu cincin dari Kabupaten Dharmasraya salah satu batu cincin yang banyak dicari oleh pengoleksi maupun penjual.



# Kabupaten Pesisir Selatan



## Dasar Pembentukan

UU no 12 tahun 1956 Jis UU Drt no 21 tahun 1957 Jo UU no 58 tahun 1958

## Ibukota

Painan

## Alamat Kantor Bupati

Jalan. H. Agus Salim 1, Painan

## Alamat Kantor DPRD

Painan, Iv Jurai, Painan, Iv Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

## Luas Wilayah

5.749,89 km<sup>2</sup>.

## Jumlah Penduduk (2017)

532.429 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

15 kecamatan dan 182 nagari  
42 SKPD dan 2 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Kota Padang  
Selatan : Kabupaten Mukomuko  
Barat : Samudra Hindia  
Timur : Kabupaten Solok, kabupaten Solok Selatan

## Website

[www.pesisirselatankab.go.id](http://www.pesisirselatankab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : Ermizen, S.Pd.  
Wakil Ketua I : Hakimin  
Wakil Ketua II : H. Aprial Habas, S.H., M.H.  
Wakil Ketua III : Jamalus Yatim

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.  
Wakil Kepala Daerah : Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si  
Sekretaris Daerah : Mawardi Roska, S.IP  
Inspektur : Rusdiyanto, S.H., M.Hum.

**Neraca Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	2.787.097.905.244,76	47.821.918.320,75	2.739.275.986.924,01
2021	2.646.073.285.175,51	51.843.324.514,69	2.594.229.960.660,81
2020	2.451.096.974.899,00	85.250.809.965,10	2.365.846.164.933,90
2019	2.309.214.735.539,21	65.150.384.373,07	2.244.064.351.166,14
2018	2.119.482.060.722,09	66.837.847.630,20	2.052.644.213.091,89
2017	1.997.168.847.561,71	70.862.123.757,48	1.926.306.723.804,22
2016	2.081.442.252.462,43	72.218.574.158,34	2.009.223.678.304,09
2015	1.909.042.677.273,85	41.153.294.949,83	1.867.889.382.324,02
2014	1.740.772.449.572,46	7.696.513.852,00	1.733.075.935.720,46

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2014-2022

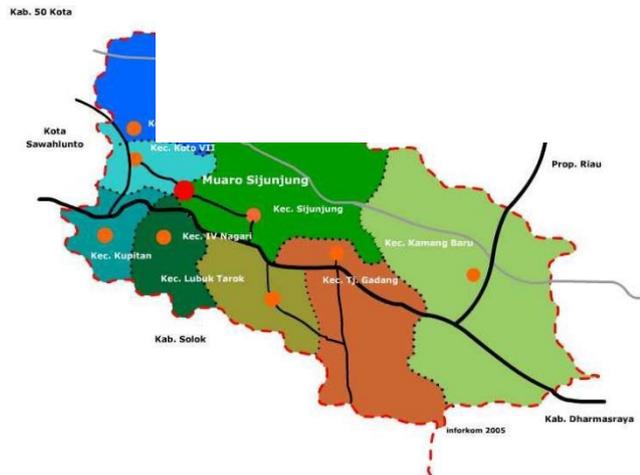
Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	1.662.717.929.358,00	1.763.605.092.125,00	1.633.057.724.701,01	1.629.187.038.487,50
2021	1.738.176.920.827,00	1.754.951.359.700,00	1.682.882.249.035,67	1.591.682.331.641,50
2020	1.698.028.198.430,00	1.448.626.751.473,35	1.629.588.564.634,45	1.362.825.886.292,37
2019	1.772.707.595.258,00	1.582.144.698.309,49	1.699.011.062.108,43	1.431.684.077.296,00
2018	1.609.033.648.934,00	1.493.532.280.831,00	1.529.141.850.638,36	1.327.619.178.497,95
2017	1.539.542.108.506,00	1.445.449.469.499,77	1.515.058.426.871,05	1.270.115.705.143,60
2016	1.577.041.581.597,00	1.799.424.409.818,85	1.457.940.857.432,74	1.500.649.148.344,62
2015	1.364.126.655.860,00	1.587.388.623.892,60	1.376.803.899.873,07	1.359.853.635.220,82
2014	1.170.013.722.863,00	1.259.770.403.538,71	1.174.349.091.058,34	1.143.199.497.048,00

Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma.

Kabupaten Pesisir selatan sebagai daerah pesisir barat Pulau Sumatera memiliki sumber daya alam berupa daerah pantai yang luas dan daerah kepulauan yang tersebar di sepanjang Pantai Barat pulau Sumatera. Topografi daerah yang beragam antara pantai, dataran, gunung, perbukitan dan hutan mengharuskan daerah ini mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Jika berkunjung ke Pesisir Selatan, jangan lewatkan untuk mengunjungi kawasan wisata Mandeh. Kawasan ini sering disebut sebagai Raja Ampat dari Barat karena keindahannya tidak kalah dengan destinasi wisata dari Timur itu.



# Kabupaten Sijunjung



## Dasar Pembentukan

### Ibukota

Muaro Sijunjung

### Alamat Kantor Bupati

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 53 Muara Sijunjung

### Alamat Kantor DPRD

Lalan, Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27564

### Luas Wilayah

3.130,80 km<sup>2</sup>

### Jumlah Penduduk (2014)

201.627 jiwa

### Jumlah Wilayah Administrasi

8 Kecamatan, 61 Nagari dan 1 desa  
35 SKPD dan 3 BUMD

### Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Tanah Datar  
Selatan : Kabupaten Dharmasraya  
Barat : Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto  
Timur : Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

### Website

[www.sijunjung.go.id](http://www.sijunjung.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : H. Bambang Surya Irwan  
Wakil I : Bakri, S.H. Dt. Majo Indo  
Wakil II : Syofyan Hendri, S.Pdi.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : Benny Dwifa Yuswir SSTP., M.Si  
Wakil Kepala Daerah : H. Iraddatillah, S.Pt  
Sekretaris Daerah : Zefnihan, A.P., M.Si.  
Inspektur : Welfiadril, S.Sos, M.Pd.

**Neraca Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	2.058.537.436.923,32	12.055.147.489,77	2.046.482.289.433,55
2021	1.931.274.145.512,86	9.307.888.552,67	1.921.966.256.960,19
2020	1.808.605.671.154,58	6.726.659.623,50	1.801.879.011.531,08
2019	1.766.620.398.428,16	9.567.791.776,78	1.757.052.606.651,38
2018	1.681.904.631.169,28	10.512.758.566,00	1.671.391.872.603,28
2017	1.604.974.577.372,89	12.020.728.094,90	1.592.953.849.277,99
2016	1.530.929.712.427,15	18.812.280.806,00	1.512.117.431.621,15
2015	1.225.642.576.645,67	8.426.509.328,00	1.217.216.067.317,67
2014	1.976.502.927.276,38	829.233.496,00	1.975.673.693.780,38

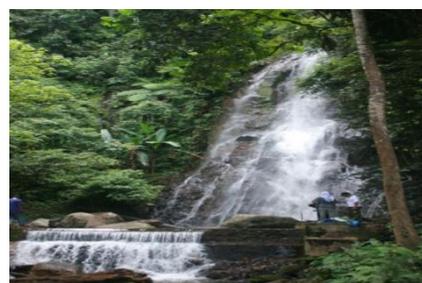
**Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sijunjung TA 2014-2022**

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	1.006.801.297.422,00	1.044.533.057.274,00	950.197.594.859,12	825.600.919.550,96
2021	972.406.961.497,00	957.701.434.900,00	1.682.882.249.035,67	790.716.308.441,84
2020	979.835.849.963,00	957.078.551.965,86	941.763.316.836,88	816.460.046.118,78
2019	1.028.609.166.824,00	1.005.312.466.631,00	997.601.916.695,50	881.479.463.619,00
2018	954.029.472.967,00	967.142.067.230,80	941.608.636.209,38	849.228.998.437,42
2017	1.002.836.393.118,00	939.841.020.643,00	975.949.625.569,07	783.134.666.234,00
2016	921.976.327.696,00	925.974.547.730,00	884.731.195.663,91	830.645.925.016,00
2015	834.500.643.901,00	867.810.895.251,48	828.391.856.538,12	746.572.178.557,00
2014	742.483.113.892,00	779.352.567.516,26	748.241.681.501,22	685.373.396.404,00

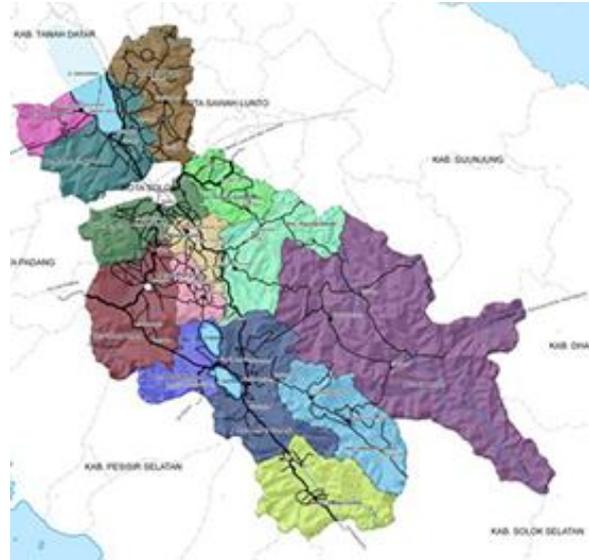
Kondisi dan topografi Kabupaten Sijunjung bervariasi pada setiap wilayah antara bukit, bergelombang dan dataran. Beberapa kecamatan berada pada lahan curam dan sangat curam (daerah berbukit), yaitu di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Lubuak Tarok dengan kemiringan antara 15 – 40 % dan lebih besar dan 40%. Hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Sijunjung yang dikategorikan sebagai dataran.

Secara Topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dan arah barat laut – tenggara. Morfologi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu terjal pada bagian barat dan timur, dataran dibagian tengah dan perbukitan landai yang terletak diantaranya.

Wilayah kabupaten ini memiliki banyak potensi dalam berbagai bidang. Berbagai jenis industri pengolahan di Kabupaten Sijunjung menjadikan sektor industri pengolahan sebagai salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. Beberapa peluang investasi untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Sijunjung diantaranya adalah industri kerajinan tikar pandan dan kerajinan kain tenun. Potensi pertambangan terbagi atas mineral logam yaitu emas, batuan seperti andesit, tanah liat, sitrukil, pasir kuarsa dan batubara yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung juga merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial. Potensi wisata tersebut meliputi potensi wisata alam, budaya dan wisata buatan yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya adalah Wisata Ngalau Talago dan Air Terjun Palukan.



# Kabupaten Solok



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

## Ibukota

Arosuka

## Alamat Kantor Kepala Daerah

Jalan Kayu Aro, Sukarami, Solok

## Alamat Kantor DPRD

Jl. Syamsu Tulus, Nan Balimo, Tj. Harapan,  
Kota Solok, Sumatera Barat 27326

## Luas Wilayah

378.800 ha

## Jumlah Penduduk (2010)

348.566 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

14 Kecamatan, 74 Nagari  
42 SKPD dan 2 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Tanah datar  
Selatan : Kabupaten Solok Selatan  
Barat : Kota Padang Dan Kab.  
Pesisir Selatan  
Timur : Kabupaten Sijunjung

## Website

[www.solokkab.go.id](http://www.solokkab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : Dodi Hendra  
Wakil I : Ivoni Munir, S.Farm.Apt  
Wakil II : Lucky Efendi

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah: Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar.  
Wakil Kepala Daerah: Jon Firman Pandu, S.H.  
Sekretaris Daerah: Medison, S. Sos, M.Si.  
Inspektur: Fidriati Ananda, S.E., Akt.

**Neraca Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	1.830.317.869.465,21	9.230.586.030,90	1.821.087.283.434,31
2021	1.768.083.829.985,27	13.098.490.465,80	1.754.985.339.519,47
2020	1.602.995.895.680,48	11.410.920.666,39	1.591.584.975.014,09
2019	1.710.627.043.381,63	5.024.821.280,18	1.705.602.222.101,45
2018	1.698.249.570.573,29	11.782.059.949,19	1.686.467.510.624,10
2017	1.535.448.946.175,37	4.669.864.721,86	1.530.779.081.453,51
2016	1.576.779.654.243,73	10.195.842.489,50	1.566.583.811.754,23
2015	1.434.360.566.995,67	3.603.617.230,49	1.430.756.949.765,18
2014	1.831.964.059.018,18	3.801.722.492,00	1.828.162.336.526,18

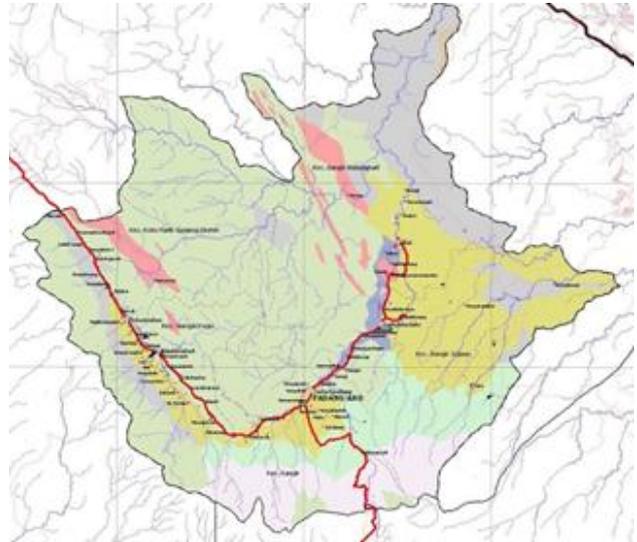
## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Solok TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	1.221.285.096.478,00	1.322.562.690.203,00	1.198.526.934.143,43	1.234.314.965.505,26
2021	1.231.792.650.267,00	1.125.428.071.954,00	1.216.306.520.994,31	1.160.519.035.134,20
2020	1.162.933.689.485,55	1.053.030.647.353,25	1.139.147.681.879,33	984.201.658.384,05
2019	1.282.592.257.180,29	1.161.138.134.190,54	1.254.704.484.574,82	1.095.235.401.850,06
2018	1.203.924.288.807,00	1.101.162.070.568,79	1.163.604.738.667,08	1.028.481.783.757,84
2017	1.174.654.996.220,00	1.104.851.415.006,62	1.144.553.785.047,73	1.035.544.129.158,80
2016	1.139.852.450.673,00	1.147.313.603.063,62	1.128.678.628.074,52	1.056.989.893.017,85
2015	1.108.663.633.087,00	1.149.146.616.126,27	1.101.484.693.326,25	999.883.287.638,41
2014	981.547.156.320,00	1.067.858.179.633,58	988.804.498.525,00	948.937.934.457,64

Kabupaten Solok memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti pesona Danau Diatas dan Danau Dibawah, Danau Singkarak, Danau Talang serta Danau Tuo. Kemudian juga terdapat Gunung Talang yang masih aktif dan hamparan hijau kebun teh di kawasan Kecamatan Gunung Talang serta banyak lainnya. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan ke Kabupaten Solok.



# Kabupaten Solok Selatan



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

## Ibukota

Padang Aro

## Alamat Kantor Bupati

Jalan Raya Lubuk Gadang Kecamatan Sangir  
Kabupaten Solok Selatan

## Alamat Kantor DPRD

Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok  
Selatan, Sumatera Barat 27778

## Luas Wilayah

359.013 ha

## Jumlah Penduduk (2011)

147.639 jiwa

## Jumlah Wilayah

7 Kecamatan, 39 Nagari  
34 SKPD dan 2 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Solok  
Selatan : Propinsi Jambi  
Barat : Kab. Pesisir Selatan  
Timur : Kabupaten Sijunjung

## Website

[www.solselkab.go.id](http://www.solselkab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : Zigo Rolanda  
Wakil Ketua I : Ali Sabri Abbas  
Wakil Ketua II : Armen Syahjohan

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : H. Khairunas, S.IP., M.Si.  
Wakil Kepala Daerah : Ir. H. Yulian Efi, M.M.  
Sekretaris Daerah : Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si  
Inspektur : Akmal Hamdi, S.H.

**Neraca Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	2.048.029.212.807,39	23.302.465.783,51	2.024.726.747.023,88
2021	1.936.416.750.369,30	20.751.975.217,00	1.915.664.775.152,30
2020	1.888.776.851.559,95	14.551.279.008,40	1.874.225.572.551,55
2019	1.805.250.097.091,17	21.501.016.104,75	1.783.749.080.986,42
2018	1.802.642.385.364,33	17.124.861.473,00	1.785.517.523.891,33
2017	1.716.684.335.160,63	6.459.245.421,12	1.710.225.089.739,51
2016	1.677.234.003.881,10	6.682.856.516,48	1.670.551.147.364,62
2015	1.592.515.927.742,94	4.083.165.537,00	1.588.432.762.205,94
2014	995.750.562.971,74	5.284.658.808,00	990.465.904.163,74

**Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan TA 2014-2022**

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	854.266.062.246,00	875.616.941.804,00	884.655.899.039,10	813.620.609.303,77
2021	850.560.190.190,00	823.552.836.409,00	866.235.598.985,00	730.565.958.343,95
2020	866.385.491.288,00	836.556.500.617,00	861.998.332.753,81	762.730.217.117,00
2019	981.690.001.344,00	900.636.619.849,00	913.258.324.428,03	770.833.853.759,01
2018	816.277.942.115,00	743.239.063.836,00	794.740.411.203,43	701.125.082.612,12
2017	821.566.342.111,00	781.570.585.487,00	795.830.635.611,93	735.944.837.660,00
2016	777.888.333.576,00	785.937.310.493,00	776.513.084.983,00	737.800.045.809,98
2015	737.791.461.762,00	760.223.621.430,00	739.447.807.717,64	673.853.815.917,35
2014	640.675.214.248,00	642.951.729.613,00	630.492.374.821,16	578.477.701.530,00

Berdasarkan peta geologi, Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi sumber daya mineral. Sumberdaya mineral tersebut antara lain terdiri dari mineral logam berupa tembaga, emas, perak; potensi panas bumi yang ditandai oleh munculnya mata air panas dan bahan galian berupa batu gamping, pasir dan batu sungai. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga akan menjadikan air terjun dua tingkat Tangsi Ampek di Kecamatan Sangir, menjadi ikon pariwisata di daerah itu.

Dalam rangka mendukung pengembangan di bidang *creative tourism* di Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan bekerjasama dengan Surya University akan melakukan perancangan dan pemodelan *creative tourism* dengan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah. Potensi daerah yang ingin ditonjolkan adalah alamnya yang indah, hasil tambang emas dan bijih besi yang melimpah, hasil perkebunan, hasil kerajinan maupun produk kesenian dan sebagainya. Program ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan Provinsi Sumatra Barat dan Universitas Surya, pada 5 Desember 2014, di Kampus Surya University, Tangerang. Bertindak sebagai penandatangan adalah Prof. Yohanes Surya, Ph.D., selaku pendiri sekaligus Rektor Universitas Surya, dan H. Muzni Zakaria M. Eng., selaku Bupati Solok Selatan.



# Kota Pariaman



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002  
tanggal 10 April 2002

## Ibukota

Pariaman

## Alamat Kantor Walikota

Jalan Syeh Burhanuddin, Pariaman

## Alamat Kantor DPRD

Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman,  
Sumatera Barat 25513

## Luas Wilayah

73,36 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2010)

97.901 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

4 kecamatan, 71 Kelurahan/Desa  
29 SKPD dan 0 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : kecamatan V Koto  
Kampung Dalam,  
kabupaten Padang  
Pariaman  
Selatan : kecamatan Nan Sabaris,  
kabupaten Padang  
Pariaman  
Barat : Samudera Hindia  
Timur : kecamatan VII Koto  
Sungai Sarik, kabupaten  
Padang Pariaman

## Website

[www.pariamankota.go.id](http://www.pariamankota.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD: Fitri Nora, A.Md

Wakil I: Faisal, S. Pd.

Wakil II: Mulyadi

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah: Dr. Genius Umar, S.Sos., M.Si.

Wakil Kepala Daerah: Drs. Mardison Mahyuddin, M.M.

Sekretaris Daerah: Yota Balad, S. STP., M. Si. .

Inspektur: Alfian Harun, S.E., M.M

**Neraca Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	756.540.625.403,41	2.656.198.292,08	753.884.427.111,33
2021	793.316.941.979,53	3.906.984.415,60	789.409.957.563,93
2020	830.023.711.147,89	7.775.094.627,50	822.248.616.520,39
2019	866.797.314.216,18	157.103.981,46	866.640.210.234,72
2018	833.400.056.881,17	76.035.902,32	833.324.020.978,85
2017	821.666.520.449,13	8.124.718.188,35	813.541.802.260,78
2016	880.690.952.872,25	7.904.820.080,68	872.786.132.791,56
2015	814.013.824.616,01	7.980.408.068,35	806.033.416.547,66
2014	1.075.464.439.668,28	7.655.049.880,35	1.067.809.389.787,93

**Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Pariaman TA 2014-2022**

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	633.558.932.689,00	641.914.693.376,00	606.838.687.945,60	606.416.280.478,57
2021	632.793.161.257,00	674.126.031.747,76	613.252.687.859,97	613.179.797.663,29
2020	689.025.589.885,00	704.720.685.521,56	632.222.867.998,86	645.135.093.144,66
2019	698.660.608.548,00	752.935.723.418,03	673.533.272.845,13	703.463.292.078,60
2018	653.325.805.028,51	622.513.381.935,53	627.169.121.763,69	542.725.474.889,73
2017	659.243.224.334,47	633.218.175.998,47	639.032.751.955,42	550.618.707.277,40
2016	599.857.784.593,30	720.203.333.887,57	621.535.178.051,91	664.690.733.675,18
2015	584.071.942.218,00	708.177.582.078,77	573.471.864.431,50	579.810.102.498,00
2014	570.681.714.908,00	658.433.555.060,33	552.365.209.077,98	505.918.261.869,54

Kota Pariaman menonjol dari sektor pariwisata bahari secara berkesinambungan karena memiliki pantai landai dengan pesona yang indah. Objek wisata pantai Pariaman di antaranya yang paling terkenal adalah pantai Gandoriah yang berlokasi di depan stasiun kereta api Pariaman yang dilengkapi dengan sarana prasarana seperti Anjungan, Pujasera, Plaza Gandoriah, Dermaga Apung, Monumen Perjuangan TNI AL, Gandoriah Bridge dan Jembatan Muaro. Pantai Kata dengan Taman Kota (Ex. Astaka MTQ Nasional Provinsi), Air Mancur menari, Anjungan, Resort dan Monumen Ikan di Karan Aua-Taluak, Pantai Pasir Lohong dengan Taman Anas Malik dan Taman Pemuda Asean (Asean Young Park) di Lohong, Pantai Cermin di Karan Aua, Rawa Mati di Mangguang, Pantai Belibis di Nareh dan memiliki Hutan bakau serta Pusat Penangkaran Penyu pertama di Sumatra Barat di Pantai Penyu, Apa, Kec. Pariaman Utara.

Selain itu Kota yang bermotto Sabiduak Sadayuang ini juga memiliki 6 (enam) pulau kecil yang tak berpenghuni yang terus dikembangkan sarana dan prasarananya sebagai destinasi wisata oleh Pemerintah Kota setempat di antaranya Pulau Angso Duo, Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujuang, Pulau Tengah dan Pulau Kasiak.

Kota ini juga dikenal dengan pesta budaya tahunan tabuik yang prosesi acaranya diselenggarakan mulai dari tanggal 1 Muharam sampai pada puncaknya tanggal 10 Muharam setiap tahunnya. Saat ini terdapat 2 museum rumah Tabuik yakni Rumah Tabuik Subarang di Jl. Imam Bonjol, Cimparuah Samping Balai Kota dan Rumah Tabuik Pasa di Jl. Syekh Burhanuddin, Karan Aua yang memuat informasi sejarah perkembangan dan pembuatan tabuik beserta replikanya.



# Kota Sawahlunto



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

## Ibukota

Sawahlunto

## Alamat Kantor Walikota

Jalan Prof. M. Yamin SH No. 70 Kota  
Sawahlunto

## Alamat Kantor DPRD

:  
Pasar, Lembah Segar, Kota Sawah Lunto,  
Sumatera Barat 27422

## Luas Wilayah

27.345 ha atau 273,45 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2008)

54.310 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

4 Kecamatan, 10 Kelurahan, 27 Desa  
27 SKPD dan 4 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Tanah Datar  
Selatan : Kabupaten Solok  
Barat : Kabupaten Solok  
Timur : Sawahlunto/-Sijunjung

## Website

[www.sawahluntokota.go.id](http://www.sawahluntokota.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD: Eka Wahyu, S.E.

Wakil I: H. Jaswandi, S.E.

Wakil II: Elvia Rita Dewi, S.H.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah: Deri Asta, S.H.

Wakil Kepala Daerah: Zohirin Sayuti, S.E.

Sekretaris Daerah: Dr.dr. Ambun Kadri, M.KM

Inspektur : Isnedi, S.E.

**Neraca Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	997.472.917.131,35	18.326.295.623,69	979.146.621.507,66
2021	993.465.115.052,19	20.924.144.546,36	972.540.970.505,83
2020	978.387.628.626,80	23.641.056.499,85	954.746.572.126,95
2019	769.706.569.698,21	29.024.895.215,19	740.681.674.483,02
2018	869.154.740.431,46	25.021.624.640,60	844.133.115.790,86
2017	820.786.038.048,54	38.896.775.219,71	781.889.262.828,83
2016	645.974.565.708,68	31.691.062.848,14	614.283.502.850,54
2015	829.540.953.864,94	22.629.761.721,00	806.911.192.143,94
2014	1.001.156.316.004,57	23.284.585.455,56	977.871.730.549,01

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	626.757.178.292,00	682.809.902.738,00	620.647.226.213,62	643.653.414.741,00
2021	598.439.921.262,00	650.538.248.327,00	598.040.864.187,45	599.040.864.187,45
2020	587.598.325.124,00	540.228.136.333,65	576.857.864.031,56	476.891.824.080,79
2019	671.749.080.316,00	627.701.487.157,00	638.026.463.488,09	551.743.879.687,01
2018	621.509.738.839,00	640.360.399.508,98	586.463.778.018,45	582.394.700.607,61
2017	608.862.187.955,00	639.418.663.508,98	584.882.133.253,37	586.462.126.161,19
2016	601.416.292.738,00	659.684.663.922,00	588.738.442.431,54	602.138.436.500,12
2015	545.543.340.291,00	620.844.550.768,60	537.483.538.214,19	547.268.450.211,56
2014	493.336.238.280,00	535.419.239.942,10	488.405.317.004,27	453.594.509.165,74

Tahun 2019 UNESCO telah menetapkan Pertambangan Ombilin di Sawahlunto (*Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto*) sebagai Warisan Dunia. Selama seratus tahun lebih, batu bara telah dieksploitasi mencapai sekitar 30 juta ton, dan masih tersisa cadangan lebih dari 100 juta ton. Namun masa depan penambangan batu bara di Kota Sawahlunto masih belum jelas, sebab cadangan yang tersisa hanya bisa dieksploitasi sebagai tambang dalam. Sedangkan dapat tidaknya eksploitasi tersebut sangat bergantung kepada penguasaan teknologi dan permintaan pasar.

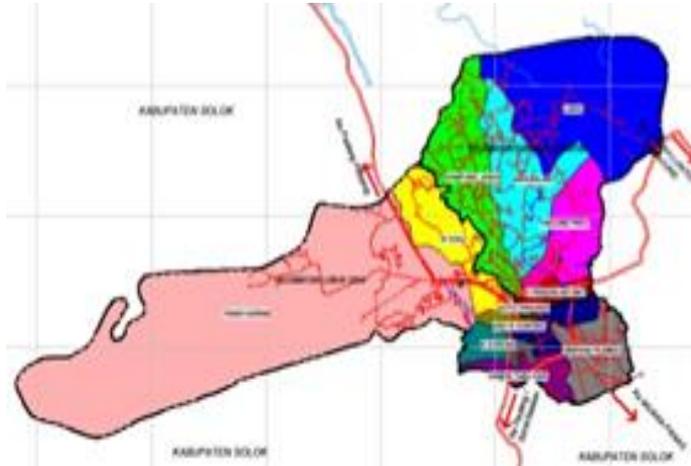
Kota Sawahlunto memiliki potensi wilayah berupa sumber daya alam dan objek wisata tambang. Kota Sawahlunto juga memiliki banyak bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda sebagai objek wisata, seperti Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto, Kantor PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin, Lubang Suro (bekas area pertambangan), Silo (tempat menimbun batubara), Museum Gudang Ransum, Lokomotif Mak Itam dan Museum Kereta Api Sawahlunto.

Kota Sawahlunto juga terkenal dengan tenun songket asal Silungkang yang terkenal memiliki kualitas tinggi, bukan hanya kilau benang emas beragam motif unik tetapi juga fungsi sosial sebagai alat kelengkapan busana tradisional.





# Kota Solok



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

## Ibukota

Solok

## Alamat Kantor Walikota

Jalan Lubuk Sikarah 89, Solok

## Alamat Kantor DPRD

Jl. Syamsu Tulus, Nan Balimo, Tj. Harapan,  
Kota Solok, Sumatera Barat 27326

## Luas Wilayah

57,64 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2010)

59.317 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

2 kecamatan dengan 13 Kelurahan  
41 SKPD dan 1 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Kecamatan Nagari Tanjung  
Bingkuang, Aripandan dan Kuncir  
Kabupaten Solok

Selatan : Kecamatan Nagari Gaung,  
Panyakalan, Koto Baru, Selayo  
Kabupaten Solok, Nagari Muaro  
Panah dan Kota Padang

Barat : Kecamatan Nagari Selayo, Koto  
Sani Kabupaten Solok

Timur : Kecamatan Nagari Saok Laweh,  
Guguk Sarai dan Kecamatan  
Gaung Kabupaten Solok

## Website

[www.solokkota.go.id](http://www.solokkota.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD: Hj. Nurnisma, S.H.  
Wakil Ketua I: Efriyon Coneng, S.H.  
Wakil Ketua II: Bayu kharisma

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah: H. Zul Elfian Umar, S.H., M.Si.  
Wakil Kepala Daerah: Dr..Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.Si  
Sekretaris Daerah: Drs. Syaiful A., M. Si.  
Inspektur: Kenfilka, S.H., M.H.

**Neraca Pemerintah Kota Solok Tahun 2014-2022**

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2022	1.570.754.977.886,07	29.349.543.944,37	1.541.405.433.941,70
2021	1.515.958.924.225,30	1.353.355.179,54	1.514.605.569.045,76
2020	1.562.414.445.972,66	1.052.758.500,27	1.561.361.687.472,39
2019	1.542.290.010.791,60	1.162.969.003,58	1.541.127.041.788,02
2018	1.440.883.615.415,91	175.550.758,53	1.440.708.064.657,38
2017	1.406.995.150.842,58	2.892.241.955,85	1.404.102.908.886,73
2016	1.373.002.012.240,98	10.431.148.760,16	1.362.570.863.480,82
2015	1.236.814.622.566,33	10.588.310.961,96	1.226.226.311.604,37
2014	1.513.516.292.011,58	10.135.839.874,77	1.503.380.452.136,81

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Solok TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	552.757.213.184,00	654.597.785.995,00	545.957.549.078,24	594.261.567.671,46
2021	544.481.063.638,00	665.780.707.425,00	547.429.561.401,27	566.878.632.377,90
2020	540.488.881.083,00	598.848.203.871,00	545.555.282.679,47	507.541.180.990,01
2019	638.338.572.096,78	692.706.367.556,86	615.403.730.489,05	610.802.239.278,93
2018	577.187.055.174,00	717.644.238.082,88	565.850.388.710,40	648.548.438.881,20
2017	617.608.693.004,00	724.477.422.174,85	597.241.847.253,12	556.789.190.793,09
2016	601.923.319.524,00	704.857.316.765,32	573.544.451.667,98	548.992.336.460,45
2015	519.617.706.797,30	586.075.575.817,17	524.519.843.153,45	477.740.630.854,00
2014	477.881.777.675,00	527.685.196.554,54	489.525.802.312,46	452.972.592.178,46

Kota Solok di Sumatera Barat terkenal dengan sebutan kota beras. Sebagian besar penduduknya memang berprofesi sebagai petani yang memproduksi beras dengan kualitas paling baik di Sumbar. Karena letaknya yang strategis, kota ini juga ingin menjadi kota perdagangan dan jasa. Potensi wisata yang menjanjikan, membuat Pemerintah Kota Solok berencana untuk mengembangkan Puncak Bidadari yang berada di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagai salah satu tujuan wisata di daerah ini.

Di Kota Solok terdapat beberapa objek wisata baik berupa objek wisata alam maupun objek wisata sejarah/budaya yang tersebar pada 2 kecamatan. Objek wisata alam yang menjadi fokus pengembangan di masa mendatang adalah Taman Rekreasi Pulau Belibis yang terletak di kelurahan Kampung Jawa dan berjarak + 3 km dari pusat kota. Pulau Belibis merupakan suatu kawasan wisata yang didukung oleh beberapa objek wisata seperti Taman Pramuka dan Arena Pacuan kuda Ampang Kualo. Pada kawasan ini terdapat sebuah telaga yang cukup besar dan hidup sejenis unggas yang dinamakan Burung Belibis. Kawasan ini juga dilengkapi arena pancing, taman burung dan arena bermain anak-anak.



# Kabupaten Kepulauan Mentawai



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999

## Ibukota

Tua Pejat

## Alamat Kantor Bupati

Jalan Raya Tuapejat km. 5 Sipora, Mentawai

## Alamat Kantor DPRD

Jl. Kecamatan Sikabalu Sibirut, Sumbar  
Sumatera Barat.

## Luas Wilayah

512.044 hektar.

## Jumlah Penduduk (2015)

85.348 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

10 kecamatan, 43 desa dan 202 dusun  
35 SKPD dan 0 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Nias Selatan  
Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan  
Barat : Samudera Indonesia  
Timur : Kabupaten Padang  
Pariaman, Kota Padang dan  
Kabupaten Pesisir Selatan

## Website

[www.mentawaikab.go.id](http://www.mentawaikab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : Yosep A. Md  
Wakil Ketua I : Isar Taileleu, S.PAK  
Wakil Ketua II : Jakop Saguruk, S.E.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : Yudas Sabaggalet, S.E., M.M.  
Wakil Kepala Daerah : Kortanius Sabeleake, S.Pt.  
Plt. Sekretaris Daerah : Rinaldi, S. Kom., M.M.  
Inspektur : Serieli Bawamenemi., SH.

**Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	2.089.002.980.203,62	672.488.347,00	2.088.330.491.856,62
2021	1.991.726.393.838,34	5.302.517.096,00	1.986.423.876.742,34
2020	1.931.893.860.011,14	1.631.549.487,00	1.930.262.310.524,14
2019	1.982.154.270.964,04	7.076.310.006,00	1.975.077.960.958,04
2018	1.509.079.864.555,07	17.566.669.057,00	1.491.513.195.498,07
2017	1.412.704.597.903,15	55.877.156.809,00	1.356.827.441.094,15
2016	1.485.756.263.116,42	1.632.299.994,00	1.667.031.491.934,72
2015	1.485.756.263.116,42	1.624.903.224,00	1.484.131.359.892,42
2014	1.666.860.663.659,86	1.613.091.698,00	1.665.247.571.961,86

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	862.728.048.145,00	902.742.047.968,00	841.527.766.248,41	787.290.388.417,00
2021	865.799.014.618,00	907.054.073.744,00	830.153.085.297,37	829.394.144.601,02
2020	870.397.848.216,78	783.588.966.706,01	832.886.813.996,51	705.615.609.606,00
2019	1.081.104.901.909,00	966.696.585.786,00	1.011.417.211.764,98	867.417.873.041,77
2018	945.010.668.801,61	927.594.541.149,17	913.545.022.458,56	791.551.495.406,23
2017	950.171.885.842,82	1.094.088.410.523,43	917.793.849.299,42	913.887.353.078,73
2016	947.365.769.203,00	1.121.968.225.263,72	910.036.777.554,73	893.175.252.945,45
2015	856.209.005.566,32	979.231.907.698,97	828.970.064.135,40	766.176.640.610,33
2014	718.979.616.792,46	832.864.953.288,06	695.651.439.435,24	658.502.559.409,43

Masyarakat setempat menyebut negeri mereka dengan nama Bumi Sikerei. Sebahagian besar penghuni pulau-pulau di kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari pulau Siberut. Daerah ini memiliki potensi alam yang banyak. Kabupaten yang memiliki garis pantai 758 kilometer ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Di perairan sepanjang pantai itulah tersimpan kekayaan laut yang cukup potensial seperti kerapu, kakap, tongkol, teripang, dan rumput laut. Kerapu dari perairan Kepulauan Mentawai bahkan menjadi komoditas ekspor. Potensi pariwisata juga tidak kalah menarik. Perairan Mentawai dikenal sebagai tempat paling menantang untuk pecinta olahraga selancar air atau surfing. Potensi pantai yang terkenal untuk olah raga selancar ini menjadi incaran wisatawan mancanegara. Lokasi selancar terdapat di Nyangnyang, Karang Bajat, Karoniki, dan Pananggalat Mainuk di Kecamatan Siberut Selatan, Katiet Bosua di Kecamatan Sipora, serta pantai selatan dan barat Kecamatan Pagai Utara.



# Kota Padang



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

## Ibukota

Padang

## Alamat Kantor Walikota

Jalan By. Pass Km. 13 Aie Pacah

## Alamat Kantor DPRD

Jl. Sawahan No.50, Sawahan Tim., Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25171

## Luas Wilayah

694,96 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2017)

927.168 jiwa

## Jumlah Wilayah Adiminstrasi

11 kecamatan, 104 kelurahan  
41 SKPD dan 6 BUMD (lima tidak aktif)

## Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Padang  
Pariaman  
Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan  
Barat : Samudera Hindia  
Timur : Kabupaten Solok.

## Website

[www.padang.go.id](http://www.padang.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : H. Syafrial Kani, S.H.

Wakil I : Arnedi Yarmen, S.Pd

Wakil II : Amril Amin, S.AP

Wakil III : Ilham Maulana, S.H.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah: Hendri Septa, B.Bus.( Acc), M.I.B

Wakil Kepala Daerah : E k o s A l b a r

Sekretaris Daerah : Dr. H. Sutan Andree Harmadi Algamar, S.STP., M.Si., M.Han.

Inspektur : Syuhandra, SH.

**Neraca Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2022**

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2022	8.493.624.460.502,59	74.699.104.306,32	8.493.624.460.502,59
2021	7.815.874.060.872,25	36.325.566.842,26	7.779.548.494.029,99
2020	7.503.141.747.431,87	28.156.649.966,33	7.474.985.097.465,54
2019	7.813.369.096.917,56	34.446.360.747,62	7.778.922.736.169,94
2018	7.125.104.872.207,53	59.626.468.267,00	7.065.478.403.940,53
2017	7.124.735.437.140,93	107.459.874.849,51	7.017.275.562.291,42
2016	6.881.114.488.677,77	57.744.527.440,26	6.823.369.961.237,51
2015	6.799.935.297.356,58	13.911.474.696,51	6.786.023.822.660,07
2014	7.885.040.700.284,65	9.505.932.023,31	7.875.534.768.261,34

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Padang TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	2.378.293.522.274,00	2.432.047.873.684,00	2.249.627.970.195,56	2.224.959.294.893,27
2021	2.519.934.973.332,00	2.590.820.702.112,00	2.222.266.851.375,30	2.211.843.587.663,33
2020	2.384.064.726.834,00	2.401.183.162.045,08	2.167.625.242.572,67	2.139.909.477.473,78
2019	2.692.438.463.837,32	2.748.605.226.492,32	2.350.116.615.606,61	2.351.499.268.939,71
2018	2.360.791.801.476,00	2.486.534.455.451,57	2.160.375.621.454,61	2.177.972.844.481,00
2017	2.177.091.356.188,00	2.339.522.587.754,21	2.092.277.707.122,03	2.077.455.348.192,00
2016	2.000.873.481.496,00	2.345.757.224.592,62	1.969.422.052.716,92	2.173.503.996.314,00
2015	2.071.126.010.240,00	2.408.291.804.913,53	1.947.485.616.093,05	1.948.501.777.319,96
2014	1.934.378.053.805,90	2.143.967.152.247,99	1.913.522.926.784,44	1.794.324.395.903,00

Kota Padang merupakan sentra perekonomian dengan jumlah pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selain itu, kota ini menjadi pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah, didukung dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan.

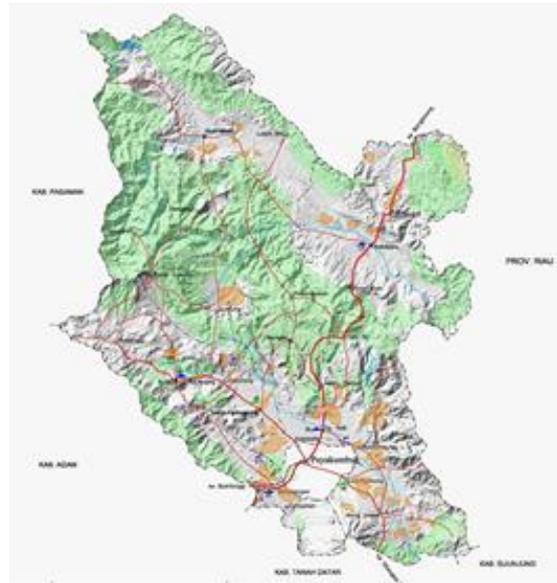
Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Siti Nurbaya, dan setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai festival untuk menunjang sektor kepariwisataan.

Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau dan masakan khas mereka yang umumnya dikenal sebagai masakan Padang. Masakan Padang yang terkenal adalah rendang yang telah dinobatkan oleh CNN International sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar *World's 50 Most Delicious Foods* (50 Hidangan Terlezat Dunia). Kota Padang menyediakan toko souvenir yang menjual buah tangan khas Sumatera Barat yaitu keripik sanjay, rendang, batik tanah liok, bahkan silungkang.





# Kabupaten Lima Puluh Kota



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

## Ibukota

Sarilamak

## Alamat Kantor Bupati

Bukit Limau, Simaralak Jalan Raya Negara  
Km. 10 Kecamatan Harau Lima Puluh Kota

## Alamat Kantor DPRD

Bukik Limau, Jl. Burhanuddin Putihah,  
Sarilamak (26271) Kecamatan Harau  
Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi  
Sumatera Barat.

## Luas Wilayah

3.354,30 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2010)

348.555 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

13 Kecamatan dan 180 Kelurahan  
42 SKPD dan 2 BUMD

## Batas Wilayah

Utara	: Provinsi Riau
Selatan	: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
Barat	: Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman,
Timur	: Provinsi Riau

## Website

[www.limapuluhkotakab.go.id](http://www.limapuluhkotakab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD: Deni Asra, S.Si  
Wakil I: Wendi Chandra, S.T.  
Wakil II: Syamsul Mikar

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah: Safaruddin Dt. Bandaro Rajo  
Wakil Kepala Daerah: Rizki Kurniawan Nakasri, S.S.  
Sekretaris Daerah: Widya Putra, S.Sos, M.Si  
Plt. Inspektur: Suherman,

**Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	1.790.494.541.075,94	40.546.425.249,10	1.749.948.115.826,84
2021	1.767.966.763.468,46	12.691.342.595,45	1.755.275.420.873,01
2020	1.744.237.736.661,10	2.086.795.695,61	1.742.150.940.965,49
2019	1.724.913.174.765,78	5.616.395.699,00	1.719.296.779.066,78
2018	1.614.113.052.518,59	3.081.320.755,00	1.611.031.731.763,59
2017	1.500.307.414.192,95	3.095.629.601,00	1.497.211.784.591,95
2016	1.482.209.479.136,52	2.478.129.526	1.479.731.349.610,52
2015	1.417.964.628.700,83	5.052.497.956	1.412.912.130.744,23
2014	1.986.446.526.069,48	3.591.807.971,64	1.982.854.718.097,84

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	1.315.171.393.961,00	1.335.440.101.346,00	1.209.471.396.990,61	1.230.594.731.297,76
2021	1.323.171.178.062,00	1.350.518.977.365,00	1.209.471.396.990,61	1.266.371.638.222,92
2020	1.260.169.657.778,00	1.143.091.242.841,00	1.209.471.396.990,61	1.063.823.655.942,37
2019	1.399.520.998.681,00	1.304.987.072.454,00	1.336.485.510.303,25	1.203.919.440.423,00
2018	1.274.660.034.522,00	1.198.186.411.292,00	1.257.168.413.662,03	1.103.111.883.976,00
2017	1.288.874.849.392,00	1.194.327.703.589,50	1.275.862.309.267,64	1.108.720.993.539,00
2016	1.217.956.019.682,00	1.251.849.594.321,56	1.178.893.526.250,94	1.153.665.477.073,00
2015	1.146.800.244.462,00	1.174.673.049.875,00	1.137.680.232.017,49	1.041.502.025.352,83
2014	1.000.375.033.639,00	1.062.338.073.204,00	1.004.220.871.876,69	985.609.935.749,00

Potensi yang terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor pertanian, sektor perdagangan dan UMKM, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan serta sektor pariwisata. Salah satu komoditas unggulan subsektor perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah gambir. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan lembah harau dan flyover kelok sembilan. Pariwisata pada Kabupaten Lima Puluh Kota mengandalkan pemandangan alam yang tetap dijaga keasriannya.



# Kabupaten Padang Pariaman



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  
tanggal 19 Maret 1956

## Ibukota

Parit Malintang

## Alamat Kantor Bupati

Jalan Mohd. Syafei 10 Pariaman

## Alamat Kantor DPRD

Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman,  
Sumatera Barat 25513

## Luas Wilayah

1.328,79 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2010)

391.056 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

17 Kecamatan, 60 Nagari  
44 SKPD dan 2 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Agam  
Selatan : Kota Padang  
Barat : Selat Mentawai (Kota  
Pariaman)  
Timur : Kabupaten Solok dan  
Kabupaten Tanah Datar

## Website

[www.padangpariamankab.go.id](http://www.padangpariamankab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : Ir. Arwinsyah, M.T.

Wakil I : Aprinaldi, M.Pd

Wakil II : Risdianto S.T.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : Suhatri Bur, S.E., M.M.

Wakil Kepala Daerah : Drs. Rahmang, M.M.

Sekretaris Daerah : Rudi Repenaldi Rilis

Inspektur : Hendra Aswara, S.S.T.P., M.M

**Neraca Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Aset (Rp)</b>	<b>Kewajiban (Rp)</b>	<b>Ekuitas (Rp)</b>
2022	1.340.357.325.040,65	16.098.971.888,22	1.324.258.353.152,43
2021	1.336.279.566.763,66	14.377.125.271,67	1.321.902.441.491,99
2020	1.341.938.962.289,66	11.143.047.577,67	1.330.795.914.711,99
2019	1.365.011.320.042,26	34.846.686.993,07	1.330.164.633.049,19
2018	1.230.967.601.085,29	43.248.474.572,47	1.187.719.126.512,82
2017	1.293.847.951.538,90	7.462.455.392,97	1.286.385.496.145,93
2016	1.298.842.171.022,83	4.916.941.680,40	1.293.925.229.342,43
2015	1.213.927.435.619,96	5.809.333.197,00	1.208.118.102.422,96
2014	1.092.650.923.368,21	833.335.047,00	1.091.817.588.321,21

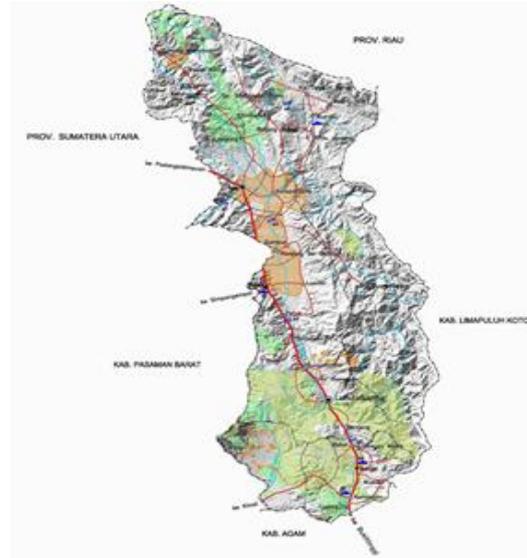
## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	1.376.652.314.082,00	1.407.999.184.315,00	1.348.628.181.500,28	1.314.912.642.338,42
2021	1.409.406.176.435,00	1.409.808.204.605,00	1.363.454.281.992,95	1.326.677.906.468,67
2020	1.348.174.651.961,00	1.220.855.094.205,16	1.305.720.742.442,99	1.169.422.356.101,00
2019	1.520.643.679.559,00	1.322.215.955.846,85	1.510.528.680.350,01	1.262.747.805.742,70
2018	1.466.361.930.430,30	1.316.014.029.655,46	1.309.985.762.673,02	1.242.195.893.069,33
2017	1.436.957.422.162,00	1.350.455.881.022,64	1.388.638.247.011,52	1.276.134.276.125,00
2016	1.351.128.053.695,00	1.399.041.293.715,00	1.353.306.741.300,52	1.336.323.358.548,30
2015	1.193.135.975.343,00	1.271.450.753.280,42	1.194.708.478.411,00	1.165.716.265.828,00
2014	1.065.292.271.101,32	1.126.346.821.140,45	1.069.627.598.087,10	1.045.817.153.269,81

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor industri rumah tangga, sektor perikanan, sektor kelautan, dan sektor pariwisata. Sektor perkebunan yang menjadi komoditas pada kabupaten ini adalah kakao dan kelapa. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Padang Pariaman mengandalkan keindahan alam seperti pantai dan bangunan-bangunan bersejarah seperti masjid tua Lubuk Barih.



# Kabupaten Pasaman



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

## Ibukota

Lubuk Sikaping

## Alamat Kantor Bupati

Jalan Sudirman 40, Lubuk Sikaping

## Alamat Kantor DPRD

Jl. Jenderal Sudirman No.29, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318

## Luas Wilayah

3.947,63 km<sup>2</sup>,

## Jumlah Penduduk (2015)

269.883 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

12 Kecamatan dan 211 Kelurahan  
39 SKPD dan 2 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Provinsi Sumatera Utara  
Selatan : Kabupaten Agam.

Barat : Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Barat  
Timur : Provinsi Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota

## Website

[www.pasamankab.go.id](http://www.pasamankab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD: Bustomi, S.E.  
Wakil I: Danny Ismaya, S. Pt.  
Wakil II: Yasri

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah: H. Benny Utama, S.H., M.M.  
Wakil Kepala Daerah: Sabar AS, S.Ag., M.Si.  
Sekretaris Daerah: Drs. H. Mara Ondak  
Inspektur: Amda Risman.

**Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2014-2022**

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2022	1.941.066.282.211,64	3.411.778.848,00	1.937.654.503.363,64
2021	1.932.917.225.569,02	17.225.784.345,00	1.915.691.441.224,02
2020	1.887.978.548.390,08	5.046.084.363,00	1.882.932.464.027,08
2019	1.879.392.164.407,87	13.675.409.388,00	1.865.716.755.019,87
2018	1.866.283.283.056,39	6.007.574.715,00	1.860.275.708.341,39
2017	1.820.714.113.676,37	23.621.034.566,00	1.797.093.079.110,37
2016	1.812.496.843.992,89	8.239.896.426,00	1.804.256.947.566,89
2015	1.663.340.747.178,30	2.253.201.366,00	1.661.087.545.812,30
2014	2.281.973.272.459,70	1.279.163.166,00	2.280.694.109.293,70

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	1.048.175.121.479,00	1.154.361.957.407,42	1.023.824.389.478,78	1.054.566.626.652,00
2021	1.042.481.118.018,00	1.152.517.581.680,93	1.020.241.378.589,49	1.015.114.606.324,00
2020	1.037.659.151.307,00	1.021.686.497.759,27	1.022.850.485.783,66	900.926.136.683,00
2019	1.060.540.079.898,00	1.018.688.321.282,26	1.036.257.946.854,01	901.069.993.101,00
2018	1.025.591.124.712,58	996,293,795,709.19	988.438.487.804,65	882,012,244,058.00
2017	1,034,854,195,416.00	1,013,650,093,431.68	998.686.811.758,93	901,286,771,051.00
2016	1.029.074.184.818,00	1.061.807.151.519,57	971.661.069.847,19	927.804.380.303,08
2015	875.985.210.647,00	938.293.026.006,74	889.151.430.226,80	809.144.441.474,00
2014	795.925.939.000,00	852.663.781.313,57	813.401.928.360,17	740.356.952.397,00

Sumber pendapatan utama Kabupaten Pasaman berasal dari subsektor tanaman pangan. Mesti demikian, Kabupaten Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya. Di samping kelapa sawit, Kabupaten Pasaman juga dikenal akan produksi minyak nilamnya. Minyak nilam yang dihasilkan Pasaman, selain yang dihasilkan Kepulauan Mentawai, merupakan yang terbaik di dunia.

Sektor pariwisata Kabupaten Pasaman didominasi oleh objek wisata alam dan objek wisata sejarah. Objek wisata alam yang cukup dikenal di Kabupaten Pasaman adalah Rimbo Panti, sedangkan objek wisata sejarah adalah Museum Tuanku Imam Bonjol.



# Kabupaten Pasaman Barat



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003  
tanggal 7 Januari

## Ibukota

Simpang Empat

## Alamat Kantor Kepala Daerah

Jalan Kihajar Dewantara No. 29, Simpang  
Empat

## Alamat Kantor DPRD

Aua Kuniang, Pasaman, Kabupaten Pasaman  
Barat, Sumatera Barat 26566

## Luas Wilayah

3.887,77 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2015)

410.307 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

11 kecamatan  
42 SKPD dan 2 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Provinsi Sumatera Utara  
Selatan : Kabupaten Pasaman dan  
Kabupaten Agam.  
Barat : Samudera Hindia  
Timur : Kabupaten Pasaman

## Website

[www.pasamanbaratkab.go.id](http://www.pasamanbaratkab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD: H. Erianto, S.E  
Wakil Ketua I: Endra Yama Putra, S.Pi.  
Wakil Ketua II: H. Daliyus K., S.Si, M.M.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : H. Hamsuardi  
Wakil Kepala Daerah : H. Risnawanto  
Sekretaris Daerah : Hendra Putra., S.STP  
Inspektur : Drs. Harisman Nasution

**Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014-2022**

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2022	2.563.913.616.176,54	19.290.816.420,73	2.544.22.799.755,54
2021	2.506.539.081.435,81	28.132.121.761,66	2.478.406.959.674,15
2020	2.365.846.282.218,25	18.223.561.835,34	2.347.622.720.382,91
2019	2.263.430.974.784,05	32.309.166.757,03	2.231.121.808.027,02
2018	2.056.226.233.476,66	15.938.613.430,81	2,040,287,620,045.84
2017	1.875.011.786.828,30	16.899.515.014,00	1.858.112.271.814,30
2016	2.146.604.020.542,88	4.727.269.169,00	2.141.876.751.373,88
2015	1.893.123.963.667,17	12.841.172.785,33	1.880.282.790.881,84
2014	2.179.194.192.935,47	20.935.419.364,00	2.158.258.773.571,47

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	1.181.613.373.512,00	1.197.059.317.029,00	1.157.750.690.657,65	1.036.817.468.523,98
2021	1.161.912.957.384,00	1.090.040.783.055,00	1.164.043.474.660,38	870.434.031.463,50
2020	1.157.576.142.808,64	1.103.801.336.665,71	1.099.444.702.466,82	1.004.985.133.062,63
2019	1.276.757.075.055,00	1.205.244.496.441,00	1.207.899.830.099,23	1.076.131.059.745,45
2018	1.239.418.937.504,00	1.220.889.778.439,00	1.134.285.630.198,25	1.100.116.599.399,06
2017	1.097.580.293.508,00	1.139.207.768.606,00	1.071.634.148.007,99	1.021.292.710.630,42
2016	1.092.716.224.286,00	1.153.242.924.577,00	1.069.252.362.654,57	989.653.911.084,50
2015	979.561.322.242,00	1.065.045.485.031,00	964.985.754.753,16	877.352.462.541,39
2014	870.938.377.303,00	925.172.084.236,00	880.805.350.711,20	807.964.932.271,00

Kabupaten yang beribukota di Simpang Ampek ini memiliki potensi daerah antara lain pada sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan, sektor peternakan, sektor industri, dan sektor pariwisata. Komoditas utama Kabupaten Pasaman Barat adalah perkebunan sawit, jeruk, dan salak. Sektor pariwisata yang dikenal di Kabupaten Pasaman Barat adalah Pantai Sikilang, Pulau Panjang, dan Gunung Talamau.

Kabupaten muda ini mempunyai potensi wisata yang tidak kalah menariknya. Gunung Talamau yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan satu dari beberapa gunung yang mempunyai panorama alam yang menarik di ranah Minangkabau. Dengan ketinggian 2.982 meter dpl menjadikan gunung tersebut sebagai puncak tertinggi di wilayah Sumatra Barat.

Gunung Talamau dapat didaki dari Desa Pinaga. Gunung ini mempunyai keunikan pada puncaknya yang memiliki banyak telaga dan menurut legenda, jumlah telaga tersebut selalu berbeda-beda dan tidak selalu sama setiap dijumpai para pendaki. Jumlah yang umum terlihat adalah 13 telaga. Gunung Talamau berdekatan sekali dengan Gunung Pasaman hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Dari daerah puncak Gunung Talamau, wisatawan dapat melihat dengan jelas puncak Gunung Pasaman atau dikenal juga sebagai Puncak Rajo Imbang Langik yaitu nama seorang raja yang pernah bertahta di Pasaman pada masa silam.



# Kabupaten Tanah Datar



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

## Ibukota

Batusangkar

## Alamat Kantor Kepala Daerah

Jalan Sutan Alam Bagarsyah, Pagarurung,  
Batusangkar

## Alamat Kantor DPRD

Jl. S. A. Bagagarsyah, Pagaruyung, Tj. Emas,  
Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat  
27281

## Luas Wilayah

1.366 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2017)

367.754 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

14 Kecamatan, 75 Nagari  
39 SKPD dan 2 BUMD

## Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Agam dan  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Selatan : Kota Sawahlunto dan  
Kabupaten Solok.  
Barat : Kabupaten Padang Pariaman  
Timur : Kabupaten Sijunjung

## Website

[www.tanahdatar.go.id](http://www.tanahdatar.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : H. Roni Mulyadi Dt. Bungsu, S.E.

Wakil I : Saidani, S.P.

Wakil II : Anton Yondra, S.E.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : Eka Putra, S.E.

Wakil Kepala Daerah : Richi Aprian, S.H., M.H.

Sekretaris Daerah : Irwandi, S.IP., M.Si.

Plt. Inspektur : Desi Rima, S.H.

**Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2022**

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2022	1.250.405.000.157,45	28.133.941.002,81	1.222.271.059.154,64
2021	1.314.295.393.58,49	23.303.089.913,23	1.290.992.303.545,26
2020	1.308.977.994.417,22	26.957.690.860,48	1.282.020.303.556,74
2019	1.318.662.252.968,83	21.112.214.648,24	1.297.550.038.320,59
2018	1.254.031.334.684,26	23.648.331.227,33	1.230.383.003.456,93
2017	1.221.308.168.072,66	17.900.041.117,43	1.203.408.126.955,23
2016	1.226.234.064.490,94	10.332.825.032,00	1.215.901.239.458,94
2015	1.180.359.290.149,18	5.737.892.298,00	1.174.621.397.851,18
2014	1.055.630.792.694,86	11.783.224.704,60	1.043.847.567.990,26

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	1.187.138.974.089,00	1.288.136.563.234,00	1.173.573.895.007,31	1.186.934.494.819,00
2021	1.263.943.445.644,00	1.332.019.634.617,00	1.251.060.500.704,34	1.207.540.100.532,00
2020	1.213.102.819.688,00	1.134.730.320.340,70	1.194.818.538.888,03	1.047.623.660.718,80
2019	1.401.730.903.970,96	1.275.456.206.915,65	1.339.707.228.547,89	1.148.395.806.322,50
2018	1.297.477.371.741,00	985.570.348.302,21	1.230.335.931.942,65	841.216.200.263,05
2017	1.263.434.519.543,00	1.176.218.428.084,23	1.224.559.427.709,56	1.052.495.045.304,58
2016	1.241.491.032.825,00	1.236.746.178.356,85	1.188.763.795.259,84	1.106.141.805.486,46
2015	1.139.662.196.931,00	1.167.510.347.645,96	1.151.898.266.368,89	1.033.176.232.576,00
2014	1.004.767.570.838,00	1.087.354.767.167,27	1.004.720.140.165,69	971.007.739.987,00

Luhak Nan Tuo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa asal usul orang Minangkabau dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Dusun Tuo Pariangan, Kecamatan Pariangan.

Banyak bukti yang masih terdapat di Kabupaten Tanah Datar ini seperti Sawah Satampang Baniah, Lurah Nan Indak Barangin, Galundi Nan Baselo, dan Kuburan Panjang Datuk Tantejo Gurhano yang dikenal sebagai arsitek rumah gadang. Kemudian dari Luhak Tanah Datar inilah kemudian orang Minangkabau berkembang dan berpindah ke daerah lain seperti Luhak 50 kota dan Luhak Agam.

Di Kabupaten Tanah Datar saat ini masih banyak terdapat peninggalan sejarah adat Minangkabau tersebut, baik berupa benda maupun tatanan budaya adat Minangkabau. Ikrar "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" ini disebut juga dengan Sumpah Satie yang juga di Tanah Datar dilahirkan, yaitu tempatnya di Bukit Marapalam Puncak Pato, Kecamatan Lintau Buo Utara.

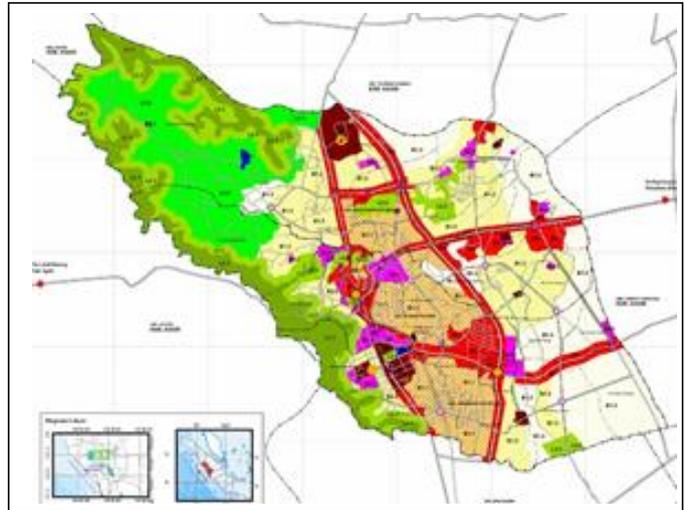
Kabupaten Tanah Datar sebagai tempat asal mula suku Minangkabau banyak sekali memiliki tempat sejarah. Industri wisata di Kabupaten Tanah Datar ini sangat potensial untuk dikembangkan.

Tempat wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar ini antara lain Istana Pagaruyung, Balairuang Sari, Puncak Pato, Prasasti Adityawarman, Batu Angkek-angkek, Rumah Gadang Balimbing, Kincir Air, Batu Basurek, Nagari Tuo Pariangan, Benteng van der Capellen, Batu Batikam, dan Istano Rajo.

Sedangkan untuk wisata alam dan budaya di Kabupaten Tanah Datar adalah Lembah Anai, Panorama Tabek Pateh, Desa Pariangan, Danau Singkarak Bukit Batu Patah, dan Ngalau Pangian.



# Kota Bukittinggi



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

## Ibukota

Bukittinggi

## Alamat Kantor Walikota

Bukit Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi

## Alamat Kantor DPRD

Jalan Khatib Sulaiman No.7, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Guguk Panjang, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Bukittinggi, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26138

## Luas Wilayah

25,24 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2017)

110.954 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

3 Kecamatan dan 24 Kelurahan  
29 SKPD dan 1 BUMD.

## Batas Wilayah

- Utara : Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan TilatangKamang
- Selatan : Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Sungai Puar
- Barat : Nagari Sianok, Tabek Sarajo, Guguak, Koto Gadang, Kecamatan IV Koto
- Timur : Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Canduang

## Website

[www.bukittinggikota.go.id](http://www.bukittinggikota.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : Herman Sofyan, S.E.

Wakil I : Nur Hasra, B.Sc.

Wakil II : Rusdy Nurman, S.H.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : H. Erman Safar, S.H.

Wakil Kepala Daerah : H. Marfendi

Sekretaris Daerah : Drs. Martias Wanto, M.M

Inspektur : Ervina Kartika Esya, S.E., Akt., M.M

**Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2014-2022**

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2022	2.045.355.031.596,55	12.332.999.300,92	2.033.022032.295,63
2021	2.052.252.906.872,87	11.436.747.898,31	2.040.816.158.974,56
2020	1.691.506.943.232,61	3.562.600.613,00	1.687.944.342.619,61
2019	1.620.883.912.558,68	2.686.736.009,00	1.618.197.176.549,68
2018	1.445.331.498.036,00	6.619.770.671,00	1.438.711.727.365,00
2017	1.515.282.417.304,37	3.426.642.672,67	1.511.855.774.631,70
2016	1.492.027.311.190,50	2.780.376.220,00	1.489.246.934.970,50
2015	1.443.534.285.031,71	2.919.583.554,91	1.440.614.701.476,80
2014	2.035.683.171.614,95	2.222.792.157,09	2.033.460.379.457,86

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	714.157.721.650,00	837.145.281.505,00	698.402.386.323,22	744.059.199.525,00
2021	684.347.061.146,00	688.635.054.453,61	688.635.054.453,61	650.051.328.563,46
2020	690.981.742.486,00	882.978.637.855,10	689.222.919.606,62	795.954.479.299,97
2019	749.055.030.480,00	890.512.534.055,88	734.106.696.896,05	716.528.264.978,33
2018	720.174.380.033,00	838.430.535.411,22	695.592.067.770,61	703.783.285.315,95
2017	710.125.538.263,16	732.873.501.966,34	653.374.887.189,69	590.090.904.897,65
2016	675.267.277.741,89	739.912.598.927,22	647.045.721.855,85	630.661.294.710,00
2015	611.264.389.203,00	685.879.275.666,48	593.323.296.014,34	579.102.342.041,49
2014	595.530.789.650,20	641.272.623.131,51	595.424.983.587,00	542.050.414.973,83

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kota Bukittinggi. Banyaknya objek wisata yang menarik, menjadikan kota ini dijuluki sebagai "kota wisata".

Ngarai Sianok merupakan salah satu objek wisata utama. Taman Panorama yang terletak di dalam kota Bukittinggi memungkinkan wisatawan untuk melihat keindahan pemandangan Ngarai Sianok. Di dalam Taman Panorama juga terdapat gua bekas persembunyian tentara Jepang sewaktu Perang Dunia II yang disebut dengan Lubang Jepang. Untuk mengunjungi nagari Koto Gadang di bawah ngarai, wisatawan bisa melalui Jembatan Koto Gadang. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 1 km ini, memiliki desain seperti Tembok Besar Tiongkok.

Di Taman Bundo Kanduang terdapat replika Rumah Gadang yang berfungsi sebagai museum kebudayaan Minangkabau. Kebun Binatang Bukittinggi dan Benteng Fort de Kock, dihubungkan oleh jembatan penyeberangan yang disebut Jembatan Limpapeh. Jembatan penyeberangan Limpapeh berada di atas Jalan A. Yani yang merupakan jalan utama di Kota Bukittinggi.

Pasar Ateh (Pasar Atas) berada berdekatan dengan Jam Gadang yang merupakan pusat keramaian kota. Di Pasar Ateh terdapat banyak penjual kerajinan tangan dan bordir, serta makanan kecil oleh-oleh khas Sumatra Barat.

Sedangkan untuk wisata kuliner Kota Bukittinggi menyediakan itiak mudo lado hijau dan makanan ringan seperti keripik sanjai.



# Kota Payakumbuh



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956  
tanggal 19 Maret 1956

## Ibukota

Payakumbuh

## Alamat Kantor Walikota

Jalan Sudirman 17, Payakumbuh

## Alamat Kantor DPRD

Jl. Soekarno Hatta, Bulakan Balai Kandih,  
Payakumbuh Bar., Kota Payakumbuh,  
Sumatera Barat 26223

## Luas Wilayah

80,43 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2015)

133.639 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

5 Kecamatan, 8 Nagari, 76 Kelurahan  
31 SKPD dan 1 BUMD

## Batas Wilayah

- Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima puluh Kota
- Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota
- Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota
- Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

## Website

[www.payakumbuhkota.go.id](http://www.payakumbuhkota.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD: Hamdi Agus, S.T.  
Wakil I: Wulan Denura, S.ST.  
Wakil II: Armen Faindal, S.H.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah: Riza Falepi, S.T., M.T.  
Wakil Kepala Daerah: H. Erwin Yunaz, S.E., M.M.  
Sekretaris Daerah: Drs. Rida Ananda, M.Si.  
Inspektur: Andri Narwan

**Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2014-2022**

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2022	1.482.892.389.279,00	23.299.063.737,00	1.459.593.325.542,00
2021	1.482.892.389.279,00	9.508.805.857,00	1.425.021.928.029,00
2020	1.401.649.709.803,00	10.440.552.100,00	1.391.209.157.703,00
2019	1.357.209.198.986,00	9.860.695.673,00	1.347.348.503.313,00
2018	1.236.485.392.786,00	9.160.313.968,00	1.227.325.078.818,00
2017	1.130.891.630.860,00	7.943.925.414,00	1.122.947.705.446,00
2016	1.054.710.869.365,00	11.449.598.588,00	1.043.261.270.777,00
2015	931.739.337.539,00	4.987.698.351,00	926.751.639.188,00
2014	1.209.901.212.890,17	1.438.417.322,00	1.208.462.795.568,17

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	696.617.590.928,00	752.356.007.312,00	704.772.804.29,00	695.915.964.175,00
2021	682.401.082.138,00	747.200.734.949,00	677.296.933.413,00	677.726.610.137,00
2020	708.900.288.188,00	750.296.396.541,00	717.701.105.678,00	702.259.030.532,00
2019	818.001.019.824,00	875.780.391.111,00	796.837.014.305,00	805.349.629.447,00
2018	723.204.712.708,00	793.750.959.949,00	708.532.769.024,00	715.317.536.552,00
2017	746.928.793.801,00	749.389.556.066,00	739.010.301.393,00	693.724.127.002,00
2016	721.538.408.135,00	785.019.939.503,00	717.632.636.495,00	740.534.383.683,00
2015	686.014.632.983,00	743.643.185.414,00	703.922.042.002,00	692.842.346.896,00
2014	603.584.940.786,00	653.771.350.803,00	603.642.162.181,33	593.640.727.396,00

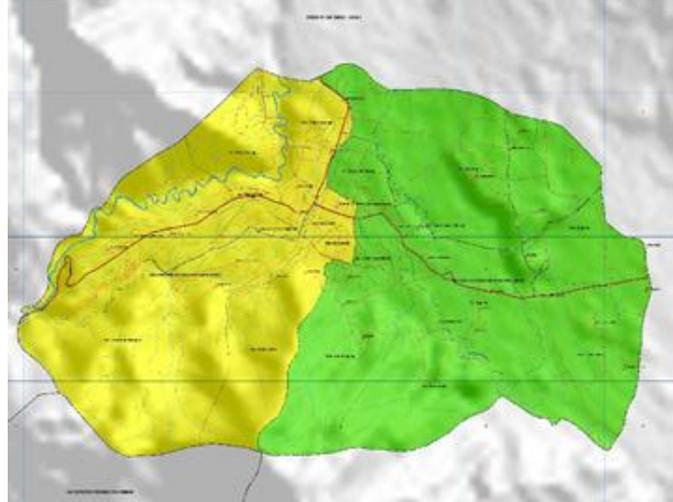
Kota Payakumbuh merupakan kota penghubung antara Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Sebagai kota persinggahan, andalan Kota Payakumbuh adalah sektor perdagangan dan jasa.

Sektor pariwisata Kota Payakumbuh berfokus pada wisata alam dan wisata sejarah. Wisata alam yang dapat ditemui di kota ini antara lain Ngalau Indah, Ngalau Sompik, Puncak Simarajo, dan Panorama Ampangan. Sedangkan wisata sejarah di kota ini antara lain Masjid Tuo Koto Nan Ompek, Masjid Gadang Balai Nan Duo Koto Nan Ompek, Museum Tan Malaka, Rumah Gadang Tuanku Lareh Koto Nan Ompek, dan perkampungan tradisional Minangkabau.

Adapun makanan khas dari Kota Payakumbuh antara lain botiah, galamai, boreh rondang, kipang, dan paniaram. Buah tangan yang dapat dibawa dari Kota Payakumbuh adalah pandai sikek dan silungkang karena Kota Payakumbuh merupakan pusat *home industry* untuk kerajinan tersebut.



# Kota Padang Panjang



## Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956  
tanggal 23 Maret 1956

## Ibukota

Padang Panjang

## Alamat Kantor Kepala Daerah

Jalan Sutan Syahrir 178, Padang Panjang

## Alamat Kantor DPRD

Jl. H. Agus Salim No.7 RT. IX Kel. Guguk  
Malintang, Guguk Malintang, Padang  
Panjang Tim., Kota Padang Panjang,  
Sumatera Barat 17112

## Luas Wilayah

23 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2010)

104.499 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

2 Kecamatan, 16 Kelurahan

27 SKPD dan 3 BUMD (1 BUMD tidak aktif)

## Batas Wilayah

Utara :Kecamatan X Koto

Selatan :Kecamatan X Koto

Barat : Kecamatan X Koto

Timur : Kecamatan Batipuh

## Website

[www.padangpanjang.go.id](http://www.padangpanjang.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD : Mardiansyah, A.Md.

Wakil I : Yulius Kaisar

Wakil II : Imral, S.E.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah : H. Fadly Amran, BBA.

Wakil Kepala Daerah : Drs. Asrul

Sekretaris Daerah : Sonny Budaya Putra, AP., M.Si.

Inspektur : Dr. Syahril, S.H., M.H.

**Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014-2022**

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2022	1.274.558.595.403,62	11.416.541.826,80	1.263.142.053.576,82
2021	1.290.185.671.093,71	7.863.151.161,77	1.282.322.519.931,94
2020	1.249.655.188.297,43	12.632.361.642,70	1.237.022.826.654,73
2019	1.253.357.292.656,43	17.906.832.365,57	1.235.450.460.290,86
2018	1.222.738.376.767,29	11.317.016.775,75	1.211.421.359.991,54
2017	1.229.689.322.425,15	42.920.562.264,94	1.186.768.760.160,21
2016	1.035.374.746.534,74	5.926.264.203,00	1.029.448.482.331,74
2015	923.542.356.293,70	5.739.516.177,00	917.802.840.116,70
2014	914.062.887.676,59	5.098.212.959,67	908.964.674.716,59

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Padang Panjang TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	551.112.035.302,00	616.638.674.470,00	538.392.534.006,03	545.209.090.060,57
2021	571.382.246.839,00	622.193.172.395,00	570.435.613.984,15	555.719.900.371,67
2020	546.345.635.456,66	592.734.340.696,43	547.774.902.696,06	543.352.682.379,84
2019	602.071.255.309,00	670.319.936.732,60	578.337.138.947,49	599.638.333.339,32
2018	573.797.764.727,68	701.850.668.309,75	553.788.839.709,53	612.982.009.674,00
2017	609.996.061.007,00	755.087.398.631,39	591.062.889.679,67	607.630.104.037,99
2016	560.907.764.325,11	704.923.834.833,89	549.936.359.823,02	548.357.928.458,41
2015	497.538.427.917,50	630.044.257.350,47	505.170.035.889,81	490.897.484.558,00
2014	478.219.616.171,00	544.621.698.906,64	475.280.788.657,33	406.617.041.960,00

Kota ini memiliki julukan sebagai Kota Serambi Mekkah, dan juga dikenal sebagai *Mesir van Andalas (Egypte van Andalas)*.

Kota Padang Panjang termasuk kota yang biasa-biasa saja tanpa memiliki potensi daerah yang signifikan. Namun dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan, pemerintah kota Padang Panjang menitik beratkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya.

Pada kota ini terdapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang terletak berdampingan dengan objek wisata Perkampungan Minangkabau (*Minang Village*) yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau baik berupa buku-buku, *microfilm*, foto dan sebagainya.

Selain itu pada kota ini juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yang dikenal dengan Mifan yang terdiri dari taman air dengan wahana kolam ombak, kolam arus, kolam renang khusus wanita, kolam renang khusus anak-anak, ember tumpah dan slide tower. Saat ini Pemkot Padang Panjang berencana untuk membangun kereta gantung dari kawasan Lembah Anai hingga ke lokasi Mifan di kawasan Silaing Bawah.



# Kabupaten Agam



## Dasar Pembentukan

Undang-undang No. 12 Tahun 1956

## Ibukota

Lubuk Basung

## Alamat Kantor Bupati

Jalan Sudirman No. 1 Padang Baru Lubuk Basung

## Alamat Kantor DPRD

Jalan Jend. Sudirman, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26452

## Luas Wilayah

2.232,30 km<sup>2</sup>

## Jumlah Penduduk (2015)

476.881 jiwa

## Jumlah Wilayah Administrasi

16 Kecamatan, 82 Nagari

27 OPD, 1BUMD, 1 BLUD

## Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat

Selatan : Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar.

Barat : Samudera Hindia

Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota

## Website

[www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id)

**Pimpinan Dewan**

Ketua DPRD: Novi Irwan, S.Pd., M.M.

Wakil I: Suharman

Wakil II: Marga Indra Putra, S.Pd.

**Pimpinan Daerah**

Kepala Daerah: DR. H. Andri Warman, M.M.

Wakil Kepala Daerah: Irwan Fikri, S.H.

Sekretaris Daerah: Drs. Martias Wanto, M.M.

Inspektur: Dafrines, S.E.

**Neraca Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2014-2022**

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2022	2.088.658.457.109,51	8.892.224.398,65	2.079.766.232.710,86
2021	2.071.901.856.138,29	15.219.051.659,74	2.056.682.804.478,55
2020	2.020.230.949.395,75	34.379.735.634,63	1.985.851.213.761,12
2019	2.044.621.244.972,68	16.376.710.747,73	2.028.244.534.224,95
2018	1.935.999.446.525,01	16.900.401.663,78	1.919.099.044.861,23
2017	1.895.241.067.342,76	14.476.164.042,00	1.880.764.903.300,76
2016	1.914.637.755.556,77	14.391.110.841,42	1.900.246.644.715,35
2015	1.810.456.827.947,84	5.489.374.428,00	1.804.967.453.519,84
2014	2.993.714.810.064,15	3.068.684.115,00	2.990.646.125.949,15

## Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Agam TA 2014-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2022	1.425.409.985.412,00	1.543.243.533.214,00	1.387.989.964.289,09	1.437.208.850.221,44
2021	1.451.528.369.198,00	1.411.504.675.335,57	1.411.504.675.335,57	1.368.645.115.804,95
2020	1.380.837.821.331,84	1.287.323.963.749,45	1.365.885.610.415,53	1.196.360.504.896,65
2019	1.522.384.167.423,42	1.417.529.746.948,01	1.511.711.867.547,53	1.344.274.572.063,28
2018	1.430.853.431.924,49	1.198.186.411.292,00	1.390.233.385.516,01	1.103.111.883.976,00
2017	1.409.522.316.338,00	1.194.327.703.589,50	1.377.484.418.822,87	1.108.720.993.539,00
2016	1.387.389.442.419,00	1.348.072.329.885,51	1.349.740.830.327,14	1.226.631.766.103,26
2015	1.267.037.168.618,00	1.298.761.884.951,36	1.275.212.405.967,86	1.179.714.975.210,90
2014	1.120.309.898.823,00	1.193.332.329.568,44	1.131.908.539.063,62	1.095.866.788.857,65

Saat ini, perekonomian Kabupaten Agam dibentuk oleh sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan industri. Mata pencaharian utama dari penduduk Kabupaten Agam adalah bidang pertanian. Komoditi andalan perkebunan Kabupaten Agam adalah kelapa sawit. Sektor pariwisata Kabupaten Agam mengandalkan wisata alam seperti daerah lain di Sumatera Barat, antara lain Danau Maninjau, Puncak Lawang dan XIII Nan Basa, Air Terjun Badorai, Pantai Ujung Karang, Kelok 44, Aia Tigo Raso, Taman Wisata Muko-Muko, dan Ngalau Tarang.



# *Galeri Foto*





